



13/40935

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TERHADAP PERSEPSI *STAKEHOLDER* SMP NEGERI KABUPATEN
BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik



UNIVERSITAS TERBUKA

Diajukan oleh :

SITI HARJANI
NIM: 015984764

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2012**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP PERSEPSI STAKEHOLDER SMP NEGERI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 06 Oktober 2012

Yang menyatakan



(SITI HARJANI)

NIM. 015984764

ABSTRACT***The influence of Accountability and Management of BOS w perception of Public Junior High School Stakeholders of Bintan Regency.***

Siti Harjani

Siti.harjani@gmail.comKeywords : *Accountability, management, perception of stakeholder*

Accountability in the management of school funding said that they found the following things: 1) stakeholders not directly involved in the planning, execution and reporting of school, chances are they may have a different perception in terms of accountability in the management of BOS than stakeholders. 2) In the process of making strategic policy of BOS management, school committee did not have sufficient access to sources of funds obtained by the school. 3) Benefits information generated by the BOS reports not maximized to the school's decision-making materials. 4) Weaken the finiction of monitoring and evaluation of policy implementation due to lack of budget funds so raised less communication allows different perceptions among stakeholders about the accountability of the management of school operational funding. The low frequency of communication between the principal with the parents. 6) Less synergy of information both in giving or receiving input between policy makers with implementers in terms of creating public policy. This study aimed to get information about the influence of accountability and management of bos to perception of Public Junior High School Stakeholders of Bintan Regency.

The method used is the field method by doing surveys. The instrument used was a questionnaire of stakeholders perception as independent variables while questionnaires of accountability and and questionnaire of management of BOS as the dependent variable. While all three instruments validated using Product Moment Correlation and reliability calculated by Cronbach alpha formula. Hypotheses tested were (1) there is a direct influence between accountability to stakeholders perception; (2) there is a direct influence between management of BOS to stakeholders perception; (3) there is a direct influence between accountability to management of BOS. This research was executed in the Bintan Regency that includes Public Junior High School of Bintan Regency. Research methods done through sampling survey method using Random Samples Sampling technique, respondents consisted of school committees that listed in Public Junior High School of Bintan Regency which consists of 15 Public Junior High School, The number of population are 130 people, sample in this research are 98 people.

The trial results showed that the reliability of each instrument are as follows: accountability $r_{13} = 0.971$, mangement of BOS $r_{23} = 0.988$, stakeholders perception $r_{12} = 0.964$, next analysis of the data using correlation and regression formulas. The research concludes the following: First, there is a direct influence between accountability (X_1) to stakeholders perception (Y) with path coefficient (p_{31}) = 0.501 that define that relations between variable is very strong and

positive and correlation coefficient (r_{13}) at 0.994 or 99.4%, determinant coefficient at 0.824 or 82.4% at significant level 0.05 (5%) that mean 82.4% stakeholders perception are affected by accountability and the remaining 17.6% sre affected ny the other factors. Second, there is a direct influence between management of BOS (X_2) to stakeholders perception (Y) with path coefficient (p_{32}) = 1.498 that define that relations between variables is very strong and positive and correlation coefficient (r_{23}) at 0.998 or 99.8%, determinant coefficient at 0.855 or 85.5% at significant level 0.05 (5%) that mean 85.3% stakeholders perception are affected by management of BOS and the remaining 14.5% sre affected ny the other factors. Third, there is a direct influence between accountability (X_1) to management of BOS (X_3) with path coefficient (p_{21}) = 0.998 that define that relations between variables is very strong and positive and correlation coefficient (r_{12}) at 0.998 or 99.8%, determinant coefficient at 0.897 or 89.7% at significant level 0.05 (5%) that mean 89.7% stakeholders perception are affected by accountability and the remaining 10.3% sre affected ny the other factors, the influence that given are very strong and positive.

The research concludes that there is a direct influence between accountability to stakeholders perception, there is a direct influence between management of BOS to stakeholders perception, there is a direct influence between accountability to management of BOS. The results of of this research are useful for optimizing the accuracy and improve management accountability of BOS to improve stakeholder perception.

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas dan Pengelolaan BOS Terhadap Persepsi Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan.

Nama : Siti Harjani

NIM : 015984764

e-mail : siti.harjani@gmail.com

Kata Kunci : akuntabilitas, pengelolaan, persepsi *stakeholder*

Akuntabilitas dan pengelolaan dana operasional sekolah dikatakan bahwa masih ditemukan adanya hal-hal antara lain: 1) *stakeholder* tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan BOS sekolah kemungkinan mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda dalam hal akuntabilitas dan pengelolaan BOS sekolah dibanding *stakeholder*. 2) Dalam proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan BOS sekolah, komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh sekolah. 3) Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan BOS sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan sekolah. 4) Melemahkan fungsi pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan karena kurangnya anggaran dana sehingga kurangnya komunikasi memungkinkan timbul persepsi yang berbeda-beda di antara *stakeholder* tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana operasional sekolah. 5) Rendahnya frekuensi komunikasi antara kepala sekolah dengan orangtua siswa. 6) Kurangnya sinerginya informasi baik dalam hal memberi atau menerima masukan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam hal menciptakan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pengaruh akuntabilitas dan pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder* pada SMPN Kabupaten Bintan.

Metode yang digunakan metode lapangan dengan melakukan *survey*. Instrumen yang digunakan adalah angket persepsi *stakeholder* sebagai variabel *independent* sedangkan angket akuntabilitas dan angket pengelolaan BOS sebagai variabel *dependent*. Sedangkan ketiga instrumen divalidasi menggunakan korelasi *Product Moment* dan kehandalan dihitung dengan rumus *Alpha Cronbach*. Hipotesis yang diuji adalah (1) terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder*; (2) terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder*; (3) terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan BOS. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bintan yang meliputi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bintan. Metode penelitian dilakukan melalui metode *survey* dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, responden penelitian terdiri dari komite sekolah yang terdaftar di SMPN Kabupaten Bintan terdiri dari 15 SMPN, dari jumlah tersebut populasi adalah 130 orang, sampel dalam penelitian adalah 98 orang.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa kehandalan masing-masing instrument adalah sebagai berikut: akuntabilitas $r_{13} = 0.971$, pengelolaan BOS $r_{23} = 0.988$, persepsi *stakeholder* $r_{12} = 0.964$, selanjutnya analisis data menggunakan rumus korelasi dan regresi. Hasil penelitian menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: pertama, terdapat pengaruh langsung akuntabilitas (X_1) terhadap persepsi *stakeholder* (Y) dengan koefisien jalur (p_{31}) = 0.501 yang memberi makna bahwa hubungan antara variabel *stakeholder* dan *akuntabilitas* koefisien korelasi (r_{13}) sebesar 0.994 atau 99,4%, koefisien determinan sebesar 0,824 atau 82,4% pada taraf signifikan 0.05 (5%) yang memberi makna bahwa 82,4% persepsi

stakeholder dipengaruhi oleh akuntabilitas dan sisanya 17,6% dipengaruhi faktor lain. Kedua, terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS (X_2) terhadap persepsi *stakeholder* (Y) dengan koefisien jalur (P_{32}) = 1,498 memberi makna hubungan sangat kuat dan positif dan koefisien korelasi (r_{23}) sebesar 0,998 atau 99,8% koefisien determinansi sebesar 0,855 atau 85,5% pada taraf signifikansi 0,05 (5%) memberi makna 85,3% persepsi *stakeholder* dipengaruhi oleh pengelolaan BOS dan sisanya 14,5% dipengaruhi faktor lain. Ketiga, terdapat pengaruh langsung akuntabilitas (X_1) terhadap pengelolaan BOS (X_2) dengan koefisien jalur (p_{21}) = 0,998 dan persamaan koefisien korelasi (r_{12}) sebesar 0,998 atau 99,8% koefisien determinansi sebesar 0,897 atau 89,7% pada taraf signifikansi 0,05 (5%) memberi makna bahwa 89,7% pengelolaan BOS dipengaruhi oleh akuntabilitas dan sisanya 10,3% dipengaruhi faktor lain, pengaruh yang diberikan sangat kuat dan positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder*, terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder*, terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan BOS sekolah. Hasil penelitian ini berguna untuk mengoptimalkan ketepatan akuntabilitas dan memperbaiki pengelolaan BOS dalam memperbaiki persepsi *stakeholder*.

UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP PERSEPSI *STAKEHOLDER* SMP NEGERI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

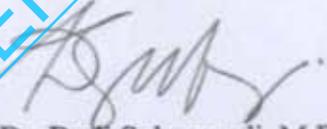
Penyusun TAPM : SITI HARJANI
 NIM : 015984764
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu, 06 Oktober 2012

Menyetujui:

PEMBIMBING I,

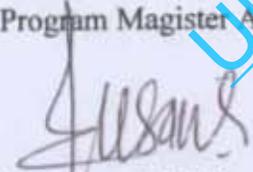

 Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP.19660619 199203 1 002

PEMBIMBING II,


 Dr. Dodi Sukmayadi, M.Ed
 NIP.19610727 198703 1 002

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/
 Program Magister Administrasi Publik


 Dra. Susanti, M.Si
 NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana


 Suciati, M.Sc,Ph.D
 NIP.19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : SITI HARJANI
NIM : 015984764
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Tesis : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP
PERSEPSI *STAKEHOLDER* SMP NEGERI KABUPATEN
BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 06 Oktober 2012

Waktu : 09.30 - 11.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisialis Penguji : Paken Pandiangan, S.Si., M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja

Pembimbing I : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing II : Dr. Dodi Sukmayadi, M.Ed

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Abstract</i>	i
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
2. Akuntabilitas	10
a. Konsep Akuntabilitas	10
b. Tujuan Akuntabilitas	12
c. Dimensi Akuntabilitas	13
d. Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas	14
e. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas	15
3. Persepsi <i>Stakeholder</i>	15
4. Konsep Prilaku Organisasi	24
5. Pengelolaan Organisasi	27
6. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31
B. Kerangka Berpikir dan Hipotesis	49

C. Definisi Operasional	50
1. Variabel Persepsi <i>Stakeholder</i> (Y)	50
2. Variabel Akuntabilitas (X1)	52
3. Variabel Pengelolaan Bos (X2)	53
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Disain Penelitian	55
B. Populasi dan Sampel	56
C. Instrumen Penelitian	58
D. Prosedur Pengumpulan Data	65
E. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data Penelitian	68
1. Gambaran umum Lokasi Penelitian.....	68
2. Tugas dan Fungsi.....	69
3. Deskripsi Data Berdasarkan Pengolahan SPSS.....	70
4. Pengujian Persyaratan Analisis	76
5. Hasil Analisis Penelitian.....	79
6. Uji Hipotesis.....	83
B. Pembahasan Hasil Penelitian	86
C. Keterbatasan Penelitian.....	103
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan sumber daya manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, sebagaimana halnya Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut dalam sisdiknas (2003) antara lain:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional.
- 3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.
- 4)

Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 5) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan. 6) Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan dalam UU no 20/2003 yang meliputi:

(1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.

Paradigma reformasi di Indonesia ditandai dengan munculnya semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan Pengelolaan dalam setiap aspek kehidupan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Menurut Bastian Indra (2007: 52), dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang membuat kualitas pendidikan sekolah belum juga beranjak. Untuk itu, sekolah harus menggunakan dana dengan seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan sekolah. Apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah dapat mengupayakan melalui dana dari masyarakat.

Pengelolaan dana, dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan pengelolaan yang transparan. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah itu dibelanjakan. Selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabilitas. Sekarang laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh setiap sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari realisasi anggaran, laporan surplus defisit dan siswa.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan akan berguna bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Selanjutnya Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan. Atau dengan kata lain, pelaporan keuangan sekolah harus dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke sekolah tersebut. Sejalan dengan pasal 51 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2003, bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini akan mendorong pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan.

Sesuai dengan ketentuan bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah MBS harus menganut prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik. Mekanisme

MBS perlu ditinjau unsur-unsur apa saja yang dapat dicermati dan komponen apa saja yang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk laporan keuangan, yang dapat mencerminkan aktivitas segala kegiatan sekolah. Manajemen keuangan berbasis sekolah mengkaji bagaimana sekolah agar dapat merencanakan, menggali, dan mengatur keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dan mempertanggung-jawabkannya kepada publik secara luas baik kepada orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat.

Terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah belum mampu mencukupi sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing selaku pengelola pendidikan yang profesional yang mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 37 Tahun 2010 dalam Dirjen Dikdas (2011: 16-18), dana BOS diperuntukkan untuk:

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB),
- 2) Pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan,
- 3) Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- 4) Pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- 5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- 6) Pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- 7) Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya.
- 8) Pembiayaan langganan daya dan jasa.
- 9) Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah.
- 10) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- 11) Pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah.

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaku pendidikan, berarti akan lebih jelas mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab maupun menerangkan tindakan pimpinan kepada pihak yang memiliki hak/ kewenangan.

Standar akuntansi BOS diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen BOS pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber BOS organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan BOS dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang akuntabel dan efektif. Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen BOS pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan prasurvei penulis bahwa fakta dilapangan sebagai berikut: 1) Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru, 2) Uang lelah kepala sekolah, 3) Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (*biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan*), 4) Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid, 5) Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain, 6) Pembelian voucher hand phone, pembelian note book dan PC desktop, 7) Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat, 8) Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan

pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda, 9) Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan manajer BOS Kabupaten Bintan tentang akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah dikatakan bahwa masih ditemukan adanya hal-hal antara lain: 1) *stakeholder* tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan BOS sekolah kemungkinan mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda dalam hal akuntabilitas pengelolaan BOS sekolah dibanding *stakeholder* internal. 2) Dalam proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan BOS sekolah, komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh sekolah. 3) Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan BOS sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan sekolah. 4) Melemahkan fungsi pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan karena kekurangan anggaran dana sehingga kurang komunikasi memungkinkan timbul persepsi yang berbeda-beda diantara *stakeholder* tentang akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah. 5) Rendahnya frekuensi komunikasi antara kepala sekolah dengan orangtua siswa. 6) Kurang bersinerginya informasi baik dalam hal memberi atau menerima masukan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam hal menciptakan kebijakan publik.

Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain: elemen masyarakat yang bervariasi baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial sehingga masih terlihat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kegunaan BOS bagi

siswa sehingga berdampak pada makin berkurangnya sumber dana untuk pengeluaran-pengeluaran lain yang bermanfaat secara langsung pada siswa, yang dapat mengurangi beban yang besar biaya sekolah yang terus dikenakan, bahkan kepada siswa yang paling miskin.

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis tentang akuntabilitas pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya persepsi *stakeholder*, apakah pengelolaan BOS sekolah benar-benar terjadi perbedaan persepsi diantara *stakeholder* atau sudah ada kesamaan persepsi, maka penulis mengangkat judul Pengaruh Akuntabilitas dan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Persepsi *Stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan bantuan operasional sekolah terhadap persepsi *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis atau mengkaji tentang:

1. Akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pengelolaan bantuan operasional sekolah terhadap persepsi *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan berguna sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang akuntabilitas pengelolaan bantuan operasional sekolah.
 - b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas pengelolaan bantuan operasional sekolah.
2. Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang akuntabilitas dan pengelolaan bantuan operasional sekolah terhadap persepsi *stakeholder*.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang akuntabilitas dan pengelolaan bantuan operasional sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini seperti tertuang dalam tabel di bawah ini :

Safwirdi (2005) dalam penelitiannya tentang Analisis Pelaporan BOS Sektor Publik Untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas Publik Dan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Pemda Tk II Propinsi DIY). Menyimpulkan bahwa secara umum Pengelolaan BOS akuntabel dan transparan. Menunjukkan adanya perbedaan antara informasi yang disampaikan pihak eksekutif dengan kebutuhan informasi pihak auditor. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis ini adalah variabel akuntabilitas pengelolaan BOS.

Jumirin Asikin (2001) Tentang Persepsi Kepala Instansi Pemerintahan Terhadap Otonomi Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja di DIY dan Jawa Tengah. Menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi antara kepala dinas dengan kepala kantor terhadap otonomi daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah. Relevansi dengan penelitian penulis dengan akuntabilitas kinerja keitaannya dengan pengelolaan bantuan operasional sekolah.

Bawuk Puji Santoso (2005) Tentang: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BOS, Partisipasi Pembayaran, dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Menyimpulkan bahwa Secara umum pengelolaan BOS oleh sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan Tidak ada perbedaan antara sekolah yang efisien dan efektif dalam hal:

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, akuntabilitas, dan transparansi. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan BOS sekolah dalam hal ini pengelolaan bantuan operasional sekolah.

2. Akuntabilitas

a. Konsep Akuntabilitas

Secara harafiah, konsep akuntabilitas atau *accountability* berasal dari dua kata yaitu *account* yang artinya rekening, laporan, catatan dan *ability* yang artinya kemampuan. Dengan demikian *akuntability* dapat diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Suharto 2005). Miriam Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat.

Hamid M uhammad (2007) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Zamroni (2000) akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi, ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari *stakeholder* sekolah. Semakin kecil partisipasi *stakeholder* dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah.

Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Headington dalam Zamroni (2000) berpendapat bahwa

"Accountability has moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of the education system." Ketiga dimensi yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu moral, hukum, dan BOS menuntut tanggung jawab dari sekolah untuk mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-tama harus dimulai bagi warga sekolah itu sendiri. Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak dapat dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usuhnya. Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu suatu lembaga pendidikan, yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas didalam manajemen BOS berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas menurut Surya Darma (2007) yaitu : (1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. (2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. (3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

b. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber

perubahan masyarakat. Mardiasmo (2004) menyatakan: tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya.

Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa, akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju ke berlangsungnya manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

c. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepada dinas pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru (Haryanto, 2007).

Pengelola sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan sekolah kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan BOS, dan kualitas *output*. Akuntabilitas BOS dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan BOS sekolah. Baik

sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntukkannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Haryanto, 2007). Pengelola BOS yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan praktik korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral individu.

Jadi moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan menjamin pengelolaan BOS yang bersih, dan jauh dari praktik korupsi. Fakta yang menyangkut praktik korupsi dalam dunia pendidikan bukan hal baru. Temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) awal tahun 2008 bahwa, korupsi dalam dunia pendidikan telah menjamah, mulai dari Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan, sampai di sekolah-sekolah. Kenyataan ini sangat ironis, karena berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya diajarkan lembaga pendidikan kepada anak bangsa, tidak saja dari segi intelektual tetapi juga moral. Informasi ini merupakan "tamparan" keras bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu dalam rangka pemerataan MBS ini, pengelolaan BOS sekolah harus jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas outputnya terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki tingkat efektivitas *output* tinggi. Sekolah yang memiliki tingkat efektivitas *outputnya* tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal.

Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2004): (a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; (b) Akuntabilitas proses; (c) Akuntabilitas program dan (d) Akuntabilitas kebijakan.

d. Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas

Menurut Hamid Muhammad (2007) ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas :

1). Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban. 2). Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 3). Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholder di awal setiap tahun anggaran. 4). Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder. 5). Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholder di akhir tahun. 6). Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. 7). Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan. 8). Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Sekolah harus mengetahui sumber dayanya, sehingga dapat digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat melibatkan *stakeholder* untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orangtua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu *stakeholder* sejak awal tahun dan merasa memiliki akan sistem yang ada.

e. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa indikator, sebagaimana dinyatakan oleh Hamid Muhammad (2005) sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
- 2). Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 3). Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
- 4). Berkurangnya kasus-kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di sekolah.

Keempat indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.

3. Persepsi Stakeholder

a. Konsep Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi berkaitan dengan proses pengenalan individu terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Robbins (2001: 32) persepsi adalah persepsi suatu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap objek yang sama, terdapat faktor yang bekerja untuk membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak pada orang yang mempersepsikannya, objek atau konteks di mana persepsi itu dibuat. Ketika seseorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Begitu pula dengan karakteristik sasaran yang diobservasi dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Faktor situasi seperti waktu, keadaan tempat, keadaan sosial juga mempengaruhi dalam membentuk persepsi seseorang terhadap objek/peristiwa yang akan dipersepsikan. Penafsiran sangat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi, antara lain sikap, motif/kebutuhan, kepentingan/minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Dengan demikian, persepsi mempengaruhi stimulus atau pesan yang kita tangkap dan mempengaruhi makna yang kita berikan kepada stimulus tersebut ketika mencapai kesadaran.

Individu pada dasarnya menerima bermacam-macam stimulus dari lingkungannya, namun tidak semua stimulus akan ditanggapi atau direspon oleh individu. Individu melakukan proses seleksi stimulus karena individu cenderung hanya akan merespon stimulus yang menarik bagi dirinya. Setiap karakteristik yang

membuat seseorang, suatu objek, atau peristiwa menyolok akan meningkatkan kemungkinan bahwa itu akan dipersepsikan.

Leavitt (1978: 27) persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Keadaan psikologis menjadi sangat berperan dalam proses interpretasi atau penafsiran terhadap stimulus, sehingga sangat mungkin persepsi seorang individu akan berbeda dengan individu lain, meskipun objek/stimulusnya sama. Proses persepsi melibatkan interpretasi yang mengakibatkan hasil persepsi antara satu orang dengan orang lain sifatnya berbeda (individualistik) (Davidoff, 1988: 231).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan penginterpretasian atau penafsiran terhadap stimulus yang diterima individu melalui alat inderanya yang melibatkan faktor pikiran, emosi dan perilaku individu sehingga menjadi sesuatu yang bermakna dan menimbulkan respon tertentu dari individu. Persepsi terdiri dari beberapa aspek. *Walgito* (1991: 50) mengemukakan tiga aspek utama persepsi. Pertama, aspek kognisi yaitu menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir/mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu perilaku persepsi. Kedua, aspek afeksi yang menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. Ketiga, aspek konasi atau psikomotor yaitu menyangkut motivasi, sikap, perilaku atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu.

Menurut teori atribusi dalam *Robbins* (2006: 201) dikatakan bahwa ketika individu-individu mengamati perilaku, mereka berupaya menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini mengembangkan penjelasan tentang cara menilai orang secara berlainan tergantung pada makna apa yang dikaitkan dengan perilaku tersebut. Adapun

faktor penentu dalam teori atribusi adalah tiga yaitu : 1) keunikan, yaitu apakah individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan, 2) konsensus, yaitu apabila seseorang dihadapkan dalam situasi yang sama bereaksi dengan cara yang sama, 3) konsistensi yaitu apakah seseorang memberikan reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Jalaludin (1998: 51), persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Ruch (1967: 300), persepsi merupakan suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (*sensory*) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Gibson dan Donely (1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989: 358).

Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard (1991: 201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Lebih lanjut dijelaskan stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1991: 209). Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus dan penjerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan

membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1986: 54).

Sedangkan menurut Thoha (1999: 123-124), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Sedangkan Kreitner dan Kinichi (1989: 109), mengartikan persepsi sebagai suatu kegiatan mental intelektual untuk menginterpretasikan dan memahami sekitar kita, akan pengakuan dari suatu obyek-obyek yang merupakan salah satu fungsi dari suatu proses.

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 199: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "*interpretation*", begitu juga berinteraksi dengan "*closure*". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.

Menurut Asngari (1984: 12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal (Jalaludin 1998: 55). Selanjutnya dijelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli.

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan (Gibson, 1986 : 54). Selaras dengan

pernyataan tersebut Krech, dkk. (dalam Sri Tjahjorini Sugiharto 2001: 19) mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Drever dalam Susanti, 2003). Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Sabri (dalam Rahmat: 1993) mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali milieu (lingkungan pergaulan) hidupnya. Proses persepsi terdiri dari tiga tahap yaitu tahapan pertama terjadi pada pengideraan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tahapan kedua yaitu stimulasi pada pengideraan diinterpretasikan dan dievaluasi. Mar'at (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Rahmat (dalam Aryanti, 1995) mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor personal dan struktural. Faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat.

Pelaku orang lain dan menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku tersebut atribusi dapat terjadi bila: 1). Suatu kejadian yang tidak biasa menarik perhatian seseorang, 2). Suatu

kejadian memiliki konsekuensi yang bersifat personal, 3). Seseorang ingin mengetahui motif yang melatarbelakangi orang lain (Shaver dalam Lestari, 1999). *Brems & Kassin* (dalam Lestari, 1999) mengatakan bahwa persepsi sosial memiliki beberapa elemen, yaitu: 1) Person, yaitu orang yang menilai orang lain; 2) Situasional, urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu; 3) Behavior, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ada dua pandangan mengenai proses persepsi, yaitu:

- a. Persepsi sosial, berlangsung cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik dan perilaku sekilas.
- b. Persepsi sosial, adalah sebuah proses yang kompleks, orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga di peroleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan obyek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi (Bartol & Bartol, 1994).

Dalam penelitian ini, persepsi adalah tanggapan terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), dimana baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal memberikan persepsinya tentang akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan informasi yang diterima mengenai pengelolaan bantuan operasional sekolah.

b. Konsep Stakeholder

Istilah stakeholder dari definisi Gray et al (2001: 9-15) menyatakan bahwa

stakeholder adalah: “.....pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para stakeholder antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain. Sesuai dengan amanah UU No. 4/U/2002 ada empat bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam DP dan KS/M, yaitu (1) partisipasi dalam memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) partisipasi dalam bentuk memberikan dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) partisipasi dalam bentuk memberikan pengontrolan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan (Depdiknas, 2002: 33).

Informasi yang diterima individu melalui alat indera dipersepsikan di otak dengan mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Kunci utama dari persepsi adalah stimulus yang diterima di sistem reseptor. Menurut Walgito (2003: 55) agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang batas stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu.

c. Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Menurut Rakhmat (1994): Krech dan Crutchfield (1975) (dalam Sobur: 460) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikategorikan menjadi:

1. Faktor fungsional, Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu.
2. Faktor-faktor struktural, Faktor-faktor struktural berarti bahwa faktor-faktor tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem saraf individu.
3. Faktor-faktor situasional, Faktor ini

banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi. 4. Faktor personal, Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian.

Berdasarkan uraian di atas persepsi stakeholder yang dimaksud adalah anggota Komite sekolah. Menurut Kemendiknas no 44 Tahun 2002 mengungkapkan bahwa anggota komite sekolah berjumlah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya ganjil, dan pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, sekretaris, bendahara.

1. Konsep Prilaku Organisasi

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Organisasi merupakan salah satu perwujudan dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi. Manusia tertarik dengan orang lain sehingga terjalin hubungan kerja dalam suatu kelompok yang mempunyai dasar-dasar tertentu. Dasar-dasar tersebut merupakan suatu daya tarik bagi pembentukan suatu organisasi. Daya tarik tersebut adakalanya karena adanya kesempatan untuk berinteraksi, kesamaan status yang dimiliki masing-masing orang, kesamaan latar belakang, maupun kesamaan sikap. Beberapa kesamaan daya tarik tersebut menjadi alasan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain.

Perilaku manusia merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ini berarti seorang individu dengan lingkungannya saling mempengaruhi dan dapat menentukan perilaku dari keduanya. Sebagai gambaran, misalnya: seorang mahasiswa yang sedang belajar di suatu perguruan tinggi, seorang karyawan sebuah bank yang melayani penabung, seorang supir taksi yang sedang mengantarkan penumpang atau seorang pedagang yang sedang menawarkan dagangannya. Mereka semuanya akan memiliki perilaku yang berbeda

satu sama lain, dan perilakunya ditentukan oleh masing-masing lingkungan tempat dimana mereka berada.

Menurut *Gibson dan Donnely* (dalam Wahid,1993: 53) empat asumsi penting dalam perilaku individu yaitu: 1) Perilaku timbul karena sesuatu sebab, 2) Perilaku diarahkan kepada tujuan, 3) Perilaku yang terarah pada tujuan dapat diganggu oleh prustasi, konflik dan kegelisahan, 4) Perilaku timbul karena motivasi.

Perilaku organisasi (*organization behavior*) adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu, meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia serta aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Menurut *Fred Luthan* (dalam Yuwono, 2006: 114), dalam perilaku organisasi di tingkat karyawan individual, organisasi pembelajaran adaptif berhubungan dengan reaksi karyawan atas perubahan lingkungan dengan respon rutin standar yang sering berupa solusi jangka pendek, sedangkan pembelajar generatif yang menekankan eksperimen dan umpan balik akan secara langsung mempengaruhi pendapat seseorang mengenai penentuan dan pemecahan masalah.

Beberapa pandangan tentang organisasi dikemukakan diantaranya oleh *Wexlwy and Yulk* (dalam Kasim, 1993 : 1) Organisasi merupakan suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka praktek-praktek dan fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktek mereka (Max Weber, dalam Miftah Thoha,1988: 25).

Organisasi dapat didefinisikan sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi (Dwight W. Aldo, dalam Thoha, 1988: 17). Organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar, atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih (Chester Barnard, dalam Thoha, 1992: 52). Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya (Hary Lubis dan Martani Huseini, 1987 : 1). Organisasi merupakan suatu alat untuk pencapaian tujuan dari orang-orang yang berada diluar organisasi tersebut, sebagai suatu alat untuk pencapaian tujuan. Untuk itu organisasi harus dibuat rasional dan akurat serta harus disusun dan beroperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan formal dan perhitungan-perhitungan efisiensi (Azhar Kasim, 1989 : 1).

Berdasarkan pandangan-pandangan tentang organisasi dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi). Perilaku organisasi juga dikenal sebagai Studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi.

2. Pengelolaan Organisasi

Manajemen pengelolaan sekolah merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Hal ini perlu mendapat perhatian karena sekolah sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa seperti yang telah digariskan dalam batasan pengertian pendidikan untuk melakukan proses yang terencana dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian aspek pengelolaan merupakan komponen yang terdiri dari beberapa unsur yaitu *planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating* (dalam Fatah 2003: 7). Unsur tersebut merupakan unsur yang tercakup dalam manajemen secara umum baik pada organisasi profit maupun organisasi non profit. Demikian halnya dalam konteks manajemen di lingkungan sekolah, tahap mencakup ke empat hal tersebut. Keberhasilan pengelolaan atau manajemen sekolah akan menentukan keberhasilan pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana manajemen dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan. Dalam pengelolaan suatu organisasi khususnya organisasi sekolah juga terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Komponen tersebut mempengaruhi kesanggupan dan kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Abd. Gaffar (dalam Fatah: 2003: 19 -20) mengemukakan bahwa: manajemen pendidikan adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola pelaksanaan pendidikan secara sistematis, berkesinambungan dan rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Dengan demikian, maka manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Dalam kerangka dasar tersebut maka perlu dilakukan

upaya untuk memperbaiki mutu dan kualitas manajemen pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri. Menurut E. Mulyasa (2003: 39), bahwa: terdapat sedikitnya enam komponen yang perlu dikelola dengan baik dalam mengelola sekolah yaitu: kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana pendidikan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam pengelolaan sekolah komponen yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah adalah terdiri dari kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.

A. Pengelolaan Kurikulum dan program pengajaran.

Komponen utama dan mendasar yang perlu dikelola dengan baik adalah kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum merupakan acuan baku terhadap pelaksanaan Program pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana tentang pengaturan bahan atau materi yang akan disampaikan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kurikulum menurut BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006: 4) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

B. Pengelolaan Tenaga Kependidikan (Pengelolaan Sumber Daya)

Keberhasilan manajemen pengelolaan sekolah tergantung dari kemampuan dan keberhasilan pimpinan dalam mengelola unsur ketenagaan yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya adalah guru dan staf tata usaha yang terkait langsung dalam

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini peningkatan produktivitas kerja serta prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku ketenaga di tempat kerja.

Menurut Mulyasa (2003: 42) bahwa manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan dengan berusaha menarik, mengembangkan, menggaji dan memotivasi serta membantua anggota memaksimalkan perkembangan karier serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

C. Pengelolaan Kesiswaan

Manajemen kesiswaan atau pengelolaan kesiswaan adalah bagian dari pengelolaan sekolah. Pengelolaan kesiswaan adalah merupakan kegiatan yang diarahkan untuk menata dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan siswa atau peserta didik. Kegiatan pengelolaan siswa tidak hanya berbentuk pencatatan terhadap data peserta didik akan tetapi meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. (Sutisna dalam Mulyasa, 2003: 46) mengemukakan beberapa tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola kesiswaan adalah sebagai berikut: (1) Kehadiran murid di sekolah, (2) Penerimaan orientasi, klarifikasi penempatan kelas dan program studi, (3) Evaluasi dan pelaporan kemajuan murid, (4) Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa, (5) Pengendalian disiplin murid, (6) Program bimbingan dan penyuluhan, (7) Program kesehatan dan keagamaan dan (8) Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional.

D. Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam konteks pengelolaan sekolah

efektif dan mandiri, pihak sekolah perlu melakukan perencanaan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai dana subsidi silang yang dianggarkan oleh pemerintah untuk membiayai operasional sekolah.

E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi dan alat-alat dan media pembelajaran.

F. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pengelolaan sekolah yang efektif. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial kemasyarakatan. Oleh karena sekolah dengan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, maka sekolah harus mengetahui kebutuhan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap sekolah.

6. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu

kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (1980: 41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harsoyo (1977: 121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang bertujuan menggal dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pada tahap arus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.

Menurut UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara

negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Pada Bab II Pasal 3 UU tersebut disebutkan asas umum penyelenggaraan Negara meliputi : 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas.

Menurut Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas dan nilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Inpres nomor 7 tahun 1999, dinyatakan bahwa tujuan pedoman adalah sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendanaan Pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain: 1) . Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 2) . Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. 3) . Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas publik. 4). Pengalokasian dana pendidikan. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah itu dibelanjakan.

Penggunaan dana BOS yang dilarang:

1. Untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah.
2. Membayar bonus, transportasi, ataupun lainnya yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
3. Melakukan rehabilitasi sedang dan berat.
4. Membangun gedung/ruangan baru.
5. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanam saham, dan membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau daerah.

a. Otonomi Daerah

Reformasi disegala bidang yang didukung oleh masyarakat dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Negara Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam MBS bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah juga harus menganut prinsip akuntabilitas dan keterbukaan terhadap publik. Berdasarkan Kepmendagri 13/2006 tentang Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah, akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan ke pada Pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Lebih lanjut akuntabilitas dapat dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Dalam hal ini, akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan ke pada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Terdapat beberapa jenis akuntabilitas antara lain adalah akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural (LAN dan BPKP dikutip oleh Halim, 2004: 167). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ke taatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara reguler akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Berdasarkan Kepmendagri 13/2006 tentang Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban.

Undang - Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan

maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu otonomi daerah diharapkan dapat : (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Di era otonomi daerah, pimpinan daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis sangat vital, karena di sanalah akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Betapapun besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya bila bupati/walikota tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Sebaliknya meskipun potensi suatu daerah kurang, tetapi dengan strategi yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BOS daerah.

Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dana terutama alokasi dari BOS daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah. Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* (Mardiasmo 2002).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi ke lembaga (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastrukturnya (Haryanto, 2007). Selain untuk mendukung reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, misalnya *new public management* yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan.

Penggunaan paradigma *new public management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya perubahan pendekatan dalam penganggaran, yakni dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*), tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetensi tender (*compulsory competitive tendering contract*) (Haryanto, 2007).

Adapun kekuasaan pengelolaan BOS daerah menurut pasal 6 U U No. 17 tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan BOS negara. Dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BOS negara, dimana sebagian dari kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola BOS daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya kekuasaan pengelolaan BOS daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola BOS daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengelola anggaran/barang daerah (Haryanto 2007: 19).

Dengan demikian, standar akuntansi BOS diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan (Bastian, 2007 : 29). Lebih jauh Bastian (2007: 30) juga mengatakan bahwa dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen BOS pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber BOS organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan BOS dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif. Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen BOS pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan tentang bagaimana BOS sekolah dikelola, menurut Bastian (2007: 32) masih ditemukan adanya hal-hal antara lain: 1) . Dalam proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan BOS sekolah, kepala sekolah belum melibatkan stakeholders, sehingga masih terjadi pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan prioritas, sifat dan kebutuhan siswa. 2) . Makin mahalnya pungutan pada masyarakat oleh sekolah negeri, sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan menengah yang baik semakin tertutup. 3) . Komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh sekolah. 4) . Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan BOS sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan entitas sekolah. 5) . Kuatnya dominasi Kepala Sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah, menyebabkan rendahnya keinginan Kepala Sekolah untuk mempertanggungjawabkan BOS sekolah dan melemahkan fungsi pengawasan melalui komite sekolah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan BOS sekolah. 6) . Masih adanya berbagai macam persepsi di antara stakeholders tentang pengelolaan BOS sekolah.

b. BOS Sekolah

Pendidikan adalah salah satu bidang yang didesentralisasikan pengelolaannya ke pada daerah, sehingga kepala sekolah selaku pengendali manajemen pengelolaan BOS pendidikan/sekolah harus bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangnya. BOS dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Suryana, 2008: 28). Dalam penyelenggaraan pendidikan, BOS dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen BOS dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain.

Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen BOS dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini (Mulyasa, 2007: 31).

Menurut Suryana (2008: 35) bahwa sumber BOS dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tujuh sumber, yaitu

(1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun ke dua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat; (4) menentukan batas-batas tugas; (5) mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas; (6) melakukan pendidikan dan latihan; dan (7) menentukan sistem dan besarnya imbalan.

Berkaitan dengan penerimaan BOS dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen BOS harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Suryana 2008: 37).

c. Komponen utama manajemen BOS Sekolah

Manajemen adalah istilah serapan dari istilah asing, yaitu dari kata “*manage*” bermakna “menggerakkan”, “mengatur”, “mengelola” dan lainnya. Definisi manajemen yang sering digunakan belakangan ini adalah “menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan”

(Tobroni,2005: 35). Sementara dalam Ensiklopedia Administrasi (1977: 23) menyebutkan bahwa, “manajemen adalah serangkaian perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.” Menurut Henri Fayol unsur-unsur dalam manajemen ada 14 yaitu: (1) Pembagian kerja (*devisian of work*); (2) Otoritas (*Authority*); (3) Disiplin (*Discipline*); (4) Kesatuan Perintah (*Unity of Comand*); (5) Kesatuan pengarahan (*unity of direction*); (6) Kepentingan pribadi dibawah kepentingan organisasi (*subordination of individual interest to the general interst*); (6) Pemberian upah (*remuneration*); (8) Pemusatan (*Centralization*); (9) Jenjang Jabatan (*Hierarchy*); (10) Ketertiban (*order*); (11) Keadilan (*Equity*); (12) Kestabilan staf (*stability of staff*); (13) Inisiatif (*inisiative*); dan (14) Semangat korp (*Spirit the corp*) (Sabardi, 1997: P.21 dan Sukarno, 1986: P.34-35).

Uraian tersebut, setidaknya terdapat empat prinsip dasar praktek manajemen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Prinsip tersebut adalah: (1) menentukan cara/metode kerja; (2) pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahliannya; (3) pemilihan prosedur kerja; (4) menentukan pelaksanaan manajemen BOS menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban (Suryana, 2008: 38).

Kepala sekolah dalam hal ini sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi o rdonator un tuk m emerintahkan pe mbayaran. N amun, t idak d ibenarkan melaksanan fungsi bendaharawan ka rena berkewajiban melakukan p engawasan ke da lam. B endaharawan, disamping m empunyai f ungsi-fungsi be ndaharawan, j uga dilimpahi f ungsi o rdonator un tuk menguji hak a tas pe mbayaran. A dapun ko mponen manajemen BOS meliputi: (1) pr osedur anggaran; (2) pr osedur a kuntansi BOS, (3) pe mbelajaran, pe rgudangan da n pr osedur pendistribusian, (4) prosedur investasi, dan (5) prosedur pemeriksaan (Suryana 2008: 40).

d. Tujuan Manajemen BOS Sekolah

Melalui ke giatan manajemen BOS maka ke butuhan pe ndanaan ke giatan s ekolah da pat direncanakan, d iupayakan pe ngadaannya, d ibukukan secara t ransparan, da n d igunakan u ntuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen BOS sekolah menurut Suryana (2008: 41) adalah:

- 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan BOS sekolah.
- 2). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BOS sekolah.
- 3). Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Menurut SK Bupati Bintan nomor: 7/1/2012 tentang T im manajemen BOS Kabupaten Bintan menjelaskan ba hwa t im manajemen bos melakukan s osialisasi a tau pelatihan pa da sekolah, menyediakan da na o perasional pr ogram b os, m elakukan p embinaan t erhadap sekolah dalam p engelolaan da n p elaporan da na bos, merencanakan da n melaksanan monitoring da n evaluasi, mengusulkan revisi SK a lokasi da na BOS tiap sekolah apabila terjadi perubahan data atau kesalahan data.

Disamping i tu sekolah s ebagai organisasi nirlaba/non bisnis da lam r angka t ransparansi dan akuntabilitias pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun laporan BOS sesuai dengan tujuan laporan BOS yang dirumuskan o leh *Financial Accounting Standarts Board* (FASB,1980) yang

telah mengeluarkan *Statement Of Financial Accounting Concepts* No.4 (SFAC 4) sebagai berikut: (Mardiasmo, 2002) 1) . Laporan BOS organisasi non bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumberdaya organisasi. 2) . Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumberdaya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. 3) . Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 4) . Memberikan informasi mengenai sumberdaya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kepentingan sumberdaya tersebut. 5) . Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumberkekayaan bersih organisasi non bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. 6) . Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumberdaya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7) . Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi BOS yang diberikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan

dan pertanggungjawaban BOS serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Prinsip-prinsip Pengelolaan BOS Pendidikan

Penggunaan anggaran dan BOS dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan BOS, adapun prinsip-prinsip pengelolaan BOS pendidikan menurut Suryana (2008: 45) sebagai berikut:

1). Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. 2). Terarah dan sesuai dengan rencana, program/kegiatan. 3). Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa BOS lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya. 4). Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

f. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Implementasi prinsip-prinsip BOS di atas pada pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, sekolah itu tidak hanya memperoleh anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dari ketiga komponen di atas. Untuk itu di sekolah sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite sekolah. Komite tersebut beranggotakan wakil orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ulama di luar sekolah dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industri (Permendiknas No.44 Tahun 2003). Sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelolaan sekolah dalam melaksanakan manajemen BOS sekolah yang baik.

g. Pengertian RAPBS

Menurut Suryana (2008: 42) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Maka seorang penanggungjawab program kegiatan di sekolah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Masih menurut Suryana (2008: 42), ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS, yaitu:

- 1). Rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk di dalamnya BOS bersumber dari: a) kontribusi orang tua siswa, b) sumbangan dari individu atau organisasi, c) sumbangan dari pemerintah, d) dari hasil usaha
- 2). Rencana penggunaan BOS dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan BOS sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik pula.

h. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS

Dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang dan diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal BOS, maka sentralisasi pengelolaan BOS perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban BOS.

Adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS menurut Suryana (2008: 44) adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan.

- 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya.
- 3) Menentukan program kerja dan rincian program.
- 4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program.
- 5) Menghitung dana yang dibutuhkan.
- 6) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya. Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, menurut Suryana (2008: 45) paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi rencana kegiatan, sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggungjawab, rencana baru atau lanjutan.
- 2) Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program.
- 3) Informasi kebutuhan: barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan.
- 4) Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan.
- 5) Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan.
- 6) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.

i. Realisasi APBS

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab:

- 1). Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran
- 2). Terjadinya penghematan atau pemborosan

- 3). Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
- 4). Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi.
- 5). Penyusunan anggaran yang kurang tepat (Suryana, 2008: 47)

Pertanggung jawaban BOS Sekolah. Semua pengeluaran BOS sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan BOS. Namun demikian prinsip kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan BOS tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan menurut Suryana (2008: 45) adalah:

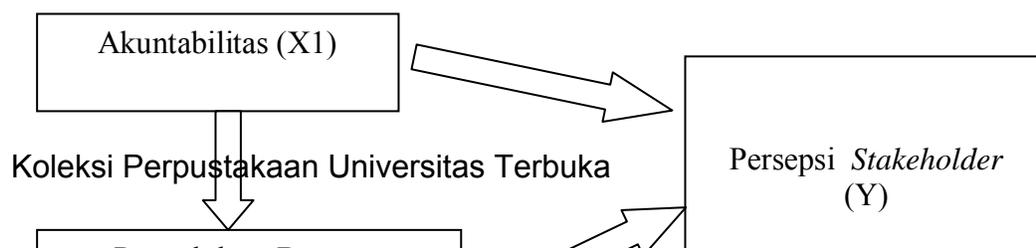
- 1). Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan BOS ke pada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
- 2). Laporan BOS tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada.
- 3). Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain.
- 4). Neraca BOS juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban BOS dari komite sekolah.

A. Kerangka Berpikir dan Hipotesis

1. Kerangka Berpikir

Masyarakat menilai bahwa akuntabilitas dan pengelolaan BOS sekolah secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh persepsi *stakeholder* sebagai obyek stimulus yang diterima meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, karena dengan pengelolaan dana yang akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana sekolah itu dibelanjakan. Akuntabilitas dan pengelolaan BOS terhadap Persepsi *stakeholder*, tergantung stimulus yang diterima, hal inilah yang akan diuji dalam penelitian ini sebagaimana tergambar dalam skema di bawah ini :

Gambar: 2.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian



2. Hipotesis

Akuntabilitas sekolah dalam pengelolaan BOSnya merupakan satu hal yang tidak bisa diabaikan lagi, mengingat tanpa adanya keterbukaan akan menimbulkan perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan atau *stakeholder* baik internal maupun eksternal, demikian halnya dengan masalah akuntabilitas pengelolaan BOS sekolah, karena sebesar apapun dan dari sumber manapun dana yang diterima oleh sekolah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemberi bantuan.

Perbedaan maupun persamaan persepsi stakeholder terhadap akuntabilitas dan pengelolaan BOS sekolah sangat tergantung kepada informasi yang diterima oleh *stakeholder* tersebut, juga berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, latar belakang pendidikan dan karakter psikologi yang bersangkutan.

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terdapat pengaruh pengelolaan bantuan operasional sekolah terhadap persepsi *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Definisi Operasional

1. Variabel persepsi stakeholder (Y)

a. Definisi Konseptual

Persepsi *Stakeholder* adalah tanggapan terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), dimana baik *stakeholder* memberikan persepsinya tentang akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan informasi yang diterima mengenai pengelolaan bantuan operasional sekolah. *Stakeholder* terdiri dari Komite sekolah pada masing-masing sekolah berjumlah 9 orang.

b. Definisi Operasional

Persepsi stakeholder berdasarkan skor sikap Komite sekolah, diukur dalam skor skala *rating persepsi stakeholder* berdasarkan kontinum tinggi rendah persepsi yang perbandingan skornya proporsional (makin tinggi skor akuntabel dan pengelolaan BOS makin tinggi tingkat persepsi *stakeholder* atau sebaliknya makin rendah skor akuntabel dan pengelolaan BOS makin rendah skor persepsi *stakeholder*). Dalam perspektif akuntansi, sekolah diharapkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban termasuk laporan dana operasional sekolah (BOS) mengenai penerimaan dan pengeluaran BOS sekolah kepada Komite Sekolah dan pemerintah, sehingga pemerintah maupun *stakeholder* dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunnya. Dengan demikian, standar akuntansi BOS diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah.

Dalam perspektif administrasi publik, tujian manajemen BOS pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber BOS organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme

pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan BOS dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang akuntabel dan efektif. Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen BOS pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Stakeholder antara lain komite sekolah yang merupakan representasi atau wakil orangtua/wali murid. Dimana *stakeholder* internal ini secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan BOS sekolah, memantau dan mengevaluasi program yang dijalankan serta memberi masukan terhadap rencana-rencana program ke depan. Sehingga sudah barang tentu mereka bisa mempunyai persepsi yang positif dalam hal akuntabilitas pengelolaan BOS sekolah.

Skor diatur berdasarkan skala lima (5) atau skala peringkat yang diimplementasikan dalam lima opsi. Untuk pernyataan positif: SS, yang berarti sangat setuju memiliki skor 5, S, yang berarti setuju memiliki skor 4, KS, yang berarti kurang setuju memiliki skor 3, TS, yang berarti tidak setuju memiliki skor 2 dan STS, yang berarti sangat tidak setuju memiliki skor 1, dan untuk pernyataan negatif, SS, yang berarti sangat setuju memiliki skor 1, S, yang berarti setuju memiliki skor 2, KS, yang berarti kurang setuju dan memiliki skor 3, TS, yang berarti tidak setuju memiliki skor 4 dan STS, yang berarti sangat tidak setuju memiliki skor 5.

2. Variabel Akuntabilitas BOS Sekolah (X₁)

a. Definisi Konseptual

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepada dinas pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru

b. Definisi Operasional

Akuntabilitas berdasarkan skala sikap komite sekolah. Akuntabilitas diukur dalam skor skala peringkat berdasarkan kontinum tinggi rendah akuntabilitas yang perbandingan skornya proporsional (makin tinggi skor makin positif akuntabilitas atau sebaliknya makin rendah skor makin negatif Akuntabilitas). Skor diatur berdasarkan skala lima (5) atau skala peringkat yang diimplementasikan dalam lima opsi. Untuk pernyataan positif: SS, yang berarti sangat setuju memiliki skor 5, S, yang berarti setuju memiliki skor 4, KS, yang berarti kurang setuju memiliki skor 3, TS, yang berarti tidak setuju memiliki skor 2 dan STS, yang berarti sangat tidak setuju memiliki skor 1, dan untuk pernyataan negatif: SS, yang berarti sangat setuju memiliki skor 1, S, yang berarti setuju memiliki skor 2, KS, yang berarti kurang setuju memiliki skor 3, TS, yang berarti tidak setuju memiliki skor 4 dan STS, yang berarti sangat tidak setuju memiliki skor 5.

3. Pengelolaan BOS (X₂)

a.

Definisi Konseptual

Pengelolaan BOS sekolah adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Dana BOS SMPN Bintan.

b. Definisi Operasional

Pengelolaan BOS berdasarkan skor sikap komite sekolah. Pengelolaan BOS diukur dalam skor skala penghargaan berdasarkan kontinum tinggi rendah pengelolaan BOS yang perbandingan skornya proporsional (makin tinggi skor pengelolaan BOS, makin tinggi pula pengelolaan BOS Sekolah atau sebaliknya makin rendah skor pengelolaan BOS, makin rendah pengelolaan BOS sekolah). Skor diatur berdasarkan skala lima (5) atau skala peringkat yang diimplementasikan dalam lima opsi. Untuk pernyataan positif: SS, yang berarti sangat setuju memiliki skor 5, S, yang berarti setuju memiliki skor 4, KS, yang berarti kurang setuju memiliki skor 3, TS, yang berarti tidak setuju memiliki skor 2, STS, yang berarti sangat tidak setuju skor

1, dan untuk pernyataan negatif: SS, yang berarti sangat setuju memiliki skor 1, S, yang berarti setuju memiliki skor 2, dan KS, yang berarti kurang setuju memiliki skor 3, TS, yang berarti tidak setuju memiliki skor 4 dan STS, yang berarti sangat tidak setuju memiliki skor 5.

UNIVERSITAS TERBUKA

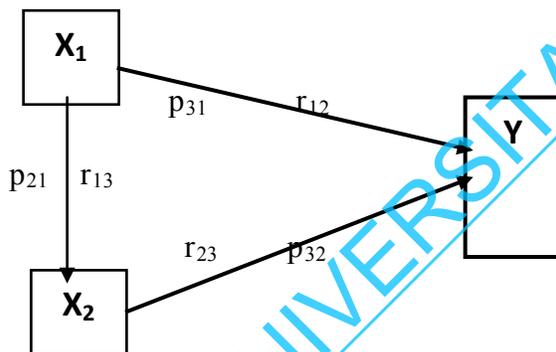
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian "Pengaruh Akuntabilitas dan Pengelolaan Bos Terhadap Persepsi *Stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau".

A. Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan kuisioner pendekatannya *path analysis* atau analisis jalur (Ridwan, 2006: 2). Variabel yang diteliti adalah persepsi *stakeholder* (Y), Akuntabilitas (X_1) dan Pengelolaan BOS (X_2). Terdapat tiga variabel penelitian, yaitu variabel eksogen yang terdiri atas Akuntabilitas dan Pengelolaan BOS, dan variabel endogen persepsi *stakeholder*. Konstelasi variabel adalah:



Gambar 3.1. Konstelasi Variabel Analisis Jalur

Dimana Y adalah variabel persepsi *stakeholder*, X_1 adalah variabel akuntabilitas dan X_2 adalah pengelolaan BOS.

B. Populasi dan Sampel

55

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 117). Sasaran populasi dalam penelitian ini terjangkau dan dalam penelitian ini terdiri dari 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan berjumlah 130 komite sekolah.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diteliti harus representatif yaitu mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlah (Sugiyono, 2009: 118).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{130}{1 + 129(0,05)^2} = 98,1$$

Dalam penelitian ini diketahui jumlah populasi (N) yaitu 130, margin kesalahan yaitu kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (e) adalah 5%, dan k adalah konstanta serta n adalah jumlah sampel yang akan ditetapkan untuk penelitian. Dengan mensubstitusikan ke rumus diperoleh jumlah sampel 98. Selanjutnya disubstitusikan ke rumus berikut:

$$n_1 = \frac{n}{N} \times N_1$$

Untuk lebih jelasnya populasi, sampel dan responden yang digunakan untuk uji coba dirinci pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Probabilitas Random Sampling

NO	NAMA SEKOLAH	ANGGOTA KOMITE	SAMPEL	UJI COBA

1	SMPN 1 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
2	SMPN 2 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
3	SMPN 3 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
4	SMPN 4 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
5	SMPN 5 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
6	SMPN 6 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
7	SMPN 7 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
8	SMPN 8 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
9	SMPN 9 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
10	SMPN 10 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
11	SMPN 11 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 7$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
12	SMPN 12 BINTAN	9	$\frac{9}{130} \times 98 = 6$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
13	SMPN 13 BINTAN	7	$\frac{7}{130} \times 98 = 5$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
14	SMPN 14 BINTAN	7	$\frac{7}{130} \times 98 = 5$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
15	SMPN 17 BINTAN	7	$\frac{7}{130} \times 98 = 5$	$\frac{9}{130} \times 30 = 2$
JUMLAH			98	30

Dimana N menyatakan jumlah populasi, e adalah tingkat kesalahan diambil 5 %, dan n adalah jumlah sampel, hasilnya diperoleh jumlah sampel dan ditetapkan 98 dan dipilih secara acak.

Teknik pengambilan sampling didasarkan atas probabilitas, sehingga dapat merinci setiap elemen dari populasi ke kemungkinan yang dapat masuk ke dalam sampel. Dalam penelitian ini

sampel diambil secara acak (*random sampel*), yang maksudnya setiap unsur tingkatan sampel, secara beberapa tingkat memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jumlah anggota komite SMP Negeri di Bintan berjumlah 130 orang, maka penentuan sampel dengan menggunakan perhitungan menurut rumus Slovin, tingkat kesalahan 5%, diperoleh 98 *stakeholder* komite, dan untuk uji coba 30 komite yang diambil dari populasi dan di luar sampel.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat pengumpul data adalah non tes, dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dimana kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang mereka ketahui. Instrumen memiliki rentang ukur dalam 5 opsi berdasarkan skala peringkat atau skala 5, yang besarnya bersifat positif maupun negatif yang pada akhirnya proposional meningkat atau menurun terhadap skor pertanyaan maupun pernyataan dalam setiap butir instrumen. Pembuatan instrumen disusun sendiri oleh peneliti secara konstruk berdasarkan kisi-kisi yang diilhami dari definisi operasional.

1. Dimensi, indikator dan nomor butir kuesioner Persepsi *Stakeholder*

Untuk menyusun instrumen dan mengukur persepsi *stakeholder* yang akan disajikan dalam bentuk kisi-kisi butir instrumen sebelum uji coba, yaitu konsep instrumen yang akan diujicobakan untuk mengukur inovasi pelayanan tata usaha. Jumlah butir pernyataan instrumen persepsi *stakeholder* sebelum uji coba 30 butir. Instrumen dengan susunan skala lima sebanyak 30 butir tersebut mengacu pada indikator-indikator persepsi *stakeholder* yang di tuangkan dalam

kisi-kisi butir pernyataan sebagai instrumen untuk mengukur persepsi *stakeholder*, dijelaskan lebih rinci pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Kisi-kisi Variabel Persepsi *Stakeholder*

No	Indikator	No. Butir					Jml
		1	2	3	4	5	
1	Mendapat gambaran tentang rencana pembiayaan sekolah	1	2	3	4	5	4
2	Mendapat gambaran tentang rencana dan hasil	5	6	7	8		4
3	Mengamati pembiayaan sesuai dengan kebutuhan	9	10	11	12		4
4	Mempunyai kesepakatan dan komitmen yang sama	13	14	15	16		4
5	Kriteria kepuasan pengguna jasa layanan	17	18	19	20		4
6	Keterlibatan dalam proses penyusunan RAPBS	21	22	23	24	25	5
7	Memverifikasi laporan BOS	26	27	28	29	30	5
	Jumlah						30

Jumlah butir pernyataan instrumen persepsi *stakeholder* sebelum uji coba 36 butir dari 7 indikator yang ada. Tujuan ujicoba adalah untuk memperoleh keabsahan konstruk, dan sampai berapa kuat butir-butir instrumen mampu mengukur indikator-indikator dari variabel persepsi *stakeholder* sebagaimana yang tercantum dalam kisi-kisi butir instrumen sebelum uji coba persepsi *stakeholder*.

Selain itu hasil uji coba instrumen bertujuan untuk memberikan informasi butir-butir yang tidak digunakan dan butir yang absah dan digunakan untuk penelitian, serta untuk memberikan gambaran instrumen final nantinya yang mencerminkan indikator-indikator dari variabel persepsi *stakeholder* final. Jumlah sampel uji coba untuk instrumen persepsi *stakeholder* adalah 30 orang persepsi *stakeholder* di luar yang akan diteliti. Uji coba yang dituangkan dalam kisi-kisi tersebut dilakukan dengan cara acak sempurna atau *random sampling*. Proses kalibrasi tersebut dilakukan dengan menganalisis data uji coba instrumen untuk menguji keabsahan butir instrumen, yaitu keabsahan internal dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir

dengan skor total instrumen. Statistik yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment* (r_{ii}).

Kriteria yang digunakan untuk uji-keabsahan butir adalah r_{tabel} dengan $\alpha=0,05$ artinya jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir dianggap absah, sedang jika r_{hitung} lebih kecil atau sama dengan r_{tabel} maka butir instrumen dianggap tidak absah dan selanjutnya di-drop atau tidak digunakan. Adapun ketentuan validitas butir akan di-drop pada $n= 30$, maka apa bila dalam perhitungan setiap butir dengan menggunakan rumus *Pearson product moment* $r_{hitung} < r_{tabel} = 0,361$. Uji coba dari 30 responden di-drop atau tidak, sesuai dengan kriteria tersebut. Butir instrumen yang valid selanjutnya dihitung reliabilitas instrumen variabel persepsi *stakeholder* dengan menggunakan rumus koefisien alpha (*alpha Cronbach*).

2. Dimensi, indikator dan nomor butir soal Akuntabilitas

Untuk menyusun instrumen dan mengukur akuntabilitas disajikan dalam bentuk kisi-kisi butir instrumen, yaitu konsep instrumen yang terlebih dahulu diujicobakan yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas. Adapun tujuan uji coba instrumen adalah untuk memberikan informasi butir-butir yang tidak digunakan dan butir yang absah dan digunakan untuk penelitian, serta untuk memberikan gambaran instrumen final variabel akuntabilitas yang mencerminkan indikator-indikator dari akuntabilitas final. Jumlah sampel uji coba untuk instrumen akuntabilitas 30 Komite Sekolah di luar yang akan diteliti. Berdasarkan definisi operasional dapat disusun kisi-kisi butir instrumen variabel akuntabilitas sebagaimana tampak pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kisi-kisi Variabel Akuntabilitas

Indikator	No. Butir				Jml		
	1	2	3	4	5	6	6
1. Mengorganisasikan penanganan BOS	1	2	3	4	5	6	6
2. Pencatatan BOS	7	8	9	10	11	12	6
3. Bukti-bukti pengeluaran BOS	13	14	15	16	17	18	6

4. Pemeriksaan BOS secara regular	19	20	21	22	23	24	6
5. Pengawasan secara regular	25	26	27	28	29	30	6
6. Laporan BOS periodik dan tahunan	31	32	33	34	35	36	6
Jumlah							36

Jumlah butir pernyataan instrumen akuntabilitas sebelum uji coba 40 butir dari 6 indikator yang ada. Tujuan uji coba adalah untuk memperoleh keabsahan konstruk, dan sampai berapa kuantitas butir-instrumen mampu mengukur indikator-indikator dari variabel akuntabilitas sebagaimana yang tercantum dalam kisi-kisi butir instrumen opini akuntabilitas dari responden komite sekolah.

Selain itu hasil ujicoba instrumen telah memberikan informasi butir-butir yang tidak digunakan dan butir yang absah dan digunakan untuk penelitian, serta untuk memberikan gambaran instrumen yang mencerminkan indikator-indikator dari variabel akuntabilitas final. Jumlah sampel uji coba untuk instrumen akuntabilitas 30 komite sekolah di luar yang akan diteliti. Uji coba yang dituangkan dalam kisi-kisi tersebut dilakukan dengan cara acak sempurna atau *random sampling*.

Proses kalibrasi tersebut dilakukan dengan menganalisis data uji coba instrumen untuk menguji keabsahan butir instrumen, yaitu keabsahan internal dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen. Statistik yang digunakan adalah koefisien *Pearson product moment* (r_{ii}). Kriteria yang digunakan untuk uji-keabsahan butir adalah r_{tabel} dengan $\alpha=0,05$ artinya jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir dianggap absah, sedang jika r_{hitung} lebih kecil atau sama dengan r_{tabel} maka butir instrumen dianggap tidak absah dan selanjutnya di-drop atau tidak digunakan. Adapun ketentuan validitas butir akan didrop pada $n = 30$, maka apabila dalam perhitungan setiap butir dengan menggunakan rumus *Pearson product moment* $r_{hitung} < r_{tabel} = 0,361$.

Uji coba dilakukan untuk 30 responden Komite Sekolah dimana setiap indikator yang didrop, sesuai dengan kriteria tersebut. Butir instrumen yang valid selanjutnya dihitung reliabilitas instrumen variabel akuntabilitas dengan menggunakan rumus koefisien alpha (*alpha Cronbach*).

3. Dimensi, indikator dan nomor butir soal Pengelolaan BOS

Untuk menyusun instrumen dan mengukur pengelolaan BOS yang akan disajikan dalam bentuk kisi-kisi butir instrumen, yaitu konsep instrumen yang terlebih dahulu diujicobakan yang digunakan untuk mengukur disiplin kerja. Adapun tujuan uji coba instrumen adalah untuk memberikan informasi butir-butir yang tidak digunakan dan butir yang absah dan digunakan untuk penelitian, serta untuk memberikan gambaran instrumen final variabel pengelolaan BOS yang mencerminkan indikator-indikator dari variabel pengelolaan BOS final. Jumlah sampel uji coba untuk instrumen pengelolaan BOS Komite di luar yang akan diteliti. Berdasarkan definisi operasional dapat disusun kisi-kisi butir instrumen variabel pengelolaan BOS sebagaimana tampak pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Kisi-kisi Variabel Pengelolaan BOS

Indikator		No. Butir				Jml
1	Identifikasi kebutuhan	1	2	3	4	4
2	Efisiensi pembiayaan	5	6	7	8	4
3	Menyajikan dalam bentuk RAPBS	9	10	11	12	4
4	Penerimaan siswa baru	13	14	15	16	4
5	Pembiayaan buku teks pembelajaran	17	18	19	20	4
6	Pembiayaan pengelolaan BOS	21	22	23	24	4
7	Transparasi	25	26	27	28	4
8	Membuat laporan	29	30	31	32	4
9	Melakukan pengawasan	33	34	35	36	4
10	Bersedia menerima sanksi	37	38	39	40	4
Jumlah						40

Jumlah butir pernyataan instrumen pengelolaan BOS sebelum uji coba 40 butir dari 10 indikator yang ada. Tujuan uji coba adalah untuk memperoleh keabsahan konstruk, dan sampai berapa kuat butir-butir instrumen mampu mengukur indikator-indikator dari variabel pengelolaan BOS sebagaimana yang tercantum dalam kisi-kisi butir instrumen pengelolaan BOS.

Selain itu hasil ujicoba instrumen telah memberikan informasi butir-butir yang tidak digunakan dan butir valid yang digunakan untuk penelitian, serta untuk memberikan gambaran instrumen yang nantinya dapat mencerminkan indikator-indikator dari variabel pengelolaan BOS final. Jumlah sampel uji coba untuk instrumen pengelolaan BOS 30 Komite sekolah di luar yang akan diteliti. Uji coba yang dituangkan dalam kisi-kisi tersebut dilakukan dengan cara acak sempurna atau *random sampling*.

Proses kalibrasi tersebut akan dilakukan dengan menganalisis data uji coba instrumen untuk menguji keabsahan butir instrumen, yaitu keabsahan internal dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen. Statistik yang digunakan adalah korelasi *Pearson product moment* (r_{ij}). Kriteria yang digunakan untuk uji-keabsahan butir adalah r_{tabel} dengan $\alpha=0,05$ artinya jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir dianggap absah, sedang jika r_{hitung} lebih kecil atau sama dengan r_{tabel} maka butir instrumen dianggap tidak absah dan selanjutnya di-drop atau tidak digunakan. Adapun ketentuan validitas butir akan didrop pada $n = 30$, maka apabila dalam perhitungan setiap butir dengan menggunakan rumus *Pearson product moment* $r_{hitung} < r_{tabel} = 0,361$ dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan

r_{xy} = Koefisien korelasi suatu butir

Σx = Jumlah harga dari skor butir

Σy = Jumlah harga dari skor total

N = Jumlah subyek

Σxy = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total

Σx^2 = Jumlah kuadrat dan skor butir

Σy^2 = Jumlah kuadrat dan skor total

Uji coba validitas dari 30 responden untuk memperoleh setiap indikator yang didrop atau tidak didrop, sesuai dengan kriteria tersebut. Butir instrumen yang masih selanjutnya dihitung reliabilitas instrumen variabel pengelolaan BOS dengan menggunakan rumus koefisien alpha

(*alpha Cronbach*) dengan rumus
$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right\}$$

Keterangan

α = reliabilitas instrumen

K = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

σ_t^2 = Varian total

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer guna menguji hipotesis yang diajukan, melalui teknik ini dapat diketahui tanggapan dan sikap responden. Kuisisioner yang digunakan sebagai alat pengukur untuk mengumpulkan data penelitian yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya.
2. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab untuk mendapatkan atau informasi dari Komite Sekolah yang diteliti. Sedangkan alat yang digunakan yakni pedoman wawancara.

D. Metode Analisis Data

Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial, statistik deskriptif untuk penyajian data gejala terpusat, mean, median, modus, distribusi frekuensi dan histogram. Statistik inferensial untuk analisis data regresi dan matrik korelasi sederhana melihat analisis jalurnya. Uji persyaratan analisis adalah uji normalitas dengan menggunakan Lilliefors, uji homogenitas dengan menggunakan uji Barlett untuk meramal ada dan tidaknya pengaruh. Sedangkan statistik inferensial untuk pengolahan data uji hipotesis melalui analisis jalur. Secara rinci tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif untuk penyajian data yaitu:

- a. Daftar distribusi frekuensi absolute dan relative dengan rumus: $f_1 = \frac{f}{n} \times 100\%$
- b. Distribusi Frekuensi: jumlah interval kelas $K = 1 + 3,3 \log n$
- c. Rerata data (Mean) dengan rumus: $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$
- d. Modus dengan rumus: $M_o = X_{o_m} + p \left(\frac{b_1}{b_1 + b_2} \right)$
- e. Median dengan rumus: $M_e = Bb + p \frac{(\frac{1}{2}n - Jf)}{f}$

f. Varian atau rerata kuadrat simpangan dengan rumus : $s^2 = \frac{\sum x^2}{n}$

g. Simpangan baku (standar deviasi) dengan rumus: $S = \sqrt{s^2}$

2. Uji persyaratan analisis

a. Normalitas : $L_o = |Z_{(s)} - Z_{(z)}|$ dengan $L_o > L_t$

b. Uji homogenitas dilakukan dengan uji Barlett

c. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan analisis varians (ANAVA dua arah)

3. Analisis inferensial dengan parth analisis

4. Hipotesis Statistik

1. $H_0 : p_{31} = 0$

$H_1 : p_{31} > 0$

2. $H_0 : p_{32} = 0$

$H_1 : p_{32} > 0$

3. $H_0 : p_{21} = 0$

$H_1 : p_{21} > 0$

Keterangan :

H_0 : Hipotesis nol tidak ada pengaruh

H_1 : Hipotesis alternatif ada pengaruh

p : Koefisien pengaruh

p_{31} = Koefisien pengaruh akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder*

p_{32} = Koefisien pengaruh pengelolaan terhadap persepsi *stakeholder*

p_{21} = Koefisien pengaruh akuntabilitas dan pengelolaan terhadap persepsi *stakeholder*.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMP berada dibawah koordinasi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar adalah salah satu direktorat jendral yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 2005 yang tadinya bernama "Direktorat Jendral Pendidikan Menengah". Perubahan nama ini menegaskan bahwa tugas pokok direktorat jendral ini adalah "Pengembangan Aspek-aspek substansi kependidikan Dasar 9 Tahun". Pembinaan SMP sendiri berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten/kota sesuai kedudukan SMP yang bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan. Pada awalnya terdapat 15 SMP Negeri yang menginduk ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan yaitu, SMPN 1 Bintan, SMPN 2 Bintan, SMPN 3 Bintan, SMPN 4 Bintan, SMPN 5 Bintan, SMPN 6 Bintan, SMPN 7 Bintan, SMPN 8 Bintan, SMPN 9 Bintan, SMPN 10 Bintan, SMPN 11 Bintan, SMPN 12 Bintan, SMPN 13 Bintan, SMPN 14 Bintan, SMPN 17 Bintan.

SMP Negeri 1 Bintan terletak di belahan Timur Pulau Bintan. Wilayah ini lebih dikenal sebagai daerah Bintan Timur, Bintan Timur sendiri telah menjadi kecamatan yang berdiri sendiri, yakni Kecamatan Bintan Timur. Karakteristik wilayah ini merupakan daerah pertanian dan nelayan, sehingga kebanyakan orangtua siswa di SMP Negeri 1 Bintan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal ini juga tentu saja menggambarkan taraf ekonomi siswa, karena kebanyakan dari orang tua siswa ini hanya 68 tani. Di SMP Negeri 1 Bintan siswa tidak dikenakan biaya pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan sepenuhnya dibiayai oleh negara

melalui DIPA, BOS Kabupaten, BOS Provinsi, dan Gakin. Keadaan keuangan ini relatif sama dengan SMP Negeri lainnya di kabupaten Bintan. SMP Negeri 2 Bintan juga masih berada di wilayah Bintan Timur tepatnya berada di Jalan Raya Kijang. Sedangkan SMP Negeri 3 Bintan berada di wilayah Gunung Lengkuas. SMP Negeri 4 Bintan berada di wilayah Korindo. SMPN 5 terletak di Kecamatan Gunung Kijang, SMPN 6 dan SMPN 7 terletak di wilayah Kecamatan Teluk Bintan, SMPN 9 dan SMPN 10 terletak di wilayah Kecamatan Teluk Sebong, sedangkan SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14 terletak di wilayah bagian utara pulau Bintan tepatnya di Kecamatan Bintan Utara. Keseluruhan SMP Negeri yang berada di Kabupaten Bintan mata pencaharian orang tua siswa lebih dominan petani, buruh dan nelayan.

2. Tugas dan Fungsi

Uraian tugas unit/satuan organisasi SMP Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 471 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMP Negeri yaitu: mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, disamping pendidikan dan pengajaran umum selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SMP Negeri menyelenggarakan fungsi: 1) melaksanakan pendidikan tingkat menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 2) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa, 3) membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat, 4) melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk perpustakaan dan laboratorium.

3. Deskripsi Data Berdasarkan Pengolahan SPSS

Perhitungan statistik setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel adalah statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberi makna data dengan memberikan gambaran umum mengenai ukuran gejala sentral terdiri dari rata-rata (*mean*), nilai

tengah (*median*), modus dan ukuran penyebaran terdiri dari rentangan, simpangan baku, dan varians serta penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram. Statistik inferensial bertujuan untuk menguji hipotesis dan untuk menggeneralisasikan sampel ke populasi. Adapun deskripsi masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik

Variabel	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Median	Mod
Persepsi	98	17	101	118	10.73	109.52	3.494	12.211	109.42	109
Akuntabili Tas	98	17	100	117	10.53	107.98	3.318	11.010	108.08	108
Pengelo laan bos	98	16	98	114	10.35	106.30	3.215	10.334	106.21	106

Sumber: Pengolahan Data Primer

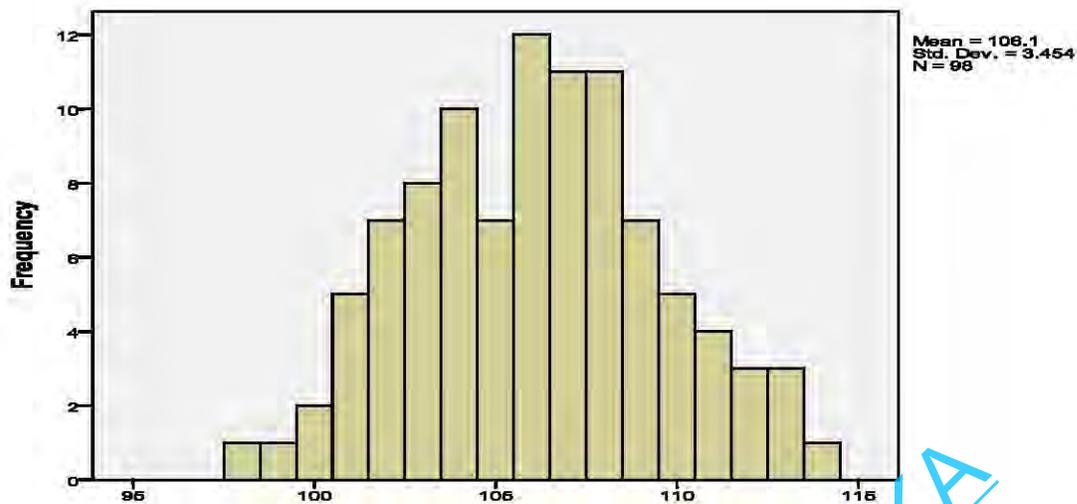
a. Variabel Persepsi Stakeholder (Y)

Hasil pengolahan data pada variabel persepsi *stakeholder* dengan menggunakan 30 item pernyataan yang diajukan kepada 98 orang responden dengan total nilai 10417, dengan demikian nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 106,30; median 106,21; modus 106; simpangan baku 3215; variansi 10,334; rentang 16; nilai minimum 98; dan nilai maksimum 114. Adapun bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogramnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Frekuensi Persepsi Stakeholder (Y)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	101	1	1.0	1.0	1.0
	102	1	1.0	1.0	2.0
	103	1	1.0	1.0	3.1
	104	4	4.1	4.1	7.1
	105	6	6.1	6.1	13.3
	106	6	6.1	6.1	19.4
	107	8	8.2	8.2	27.6
	108	9	9.2	9.2	36.7
	109	15	15.3	15.3	52.0
	110	11	11.2	11.2	63.3
	111	10	10.2	10.2	73.5
	112	9	9.2	9.2	82.7
	113	4	4.1	4.1	86.7
	114	3	3.1	3.1	89.8
	115	4	4.1	4.1	93.9
	116	3	3.1	3.1	96.9
	117	2	2.0	2.0	99.0
	118	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Sumber: Pengolahan Data Primer



Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.1. Histogram Persepsi

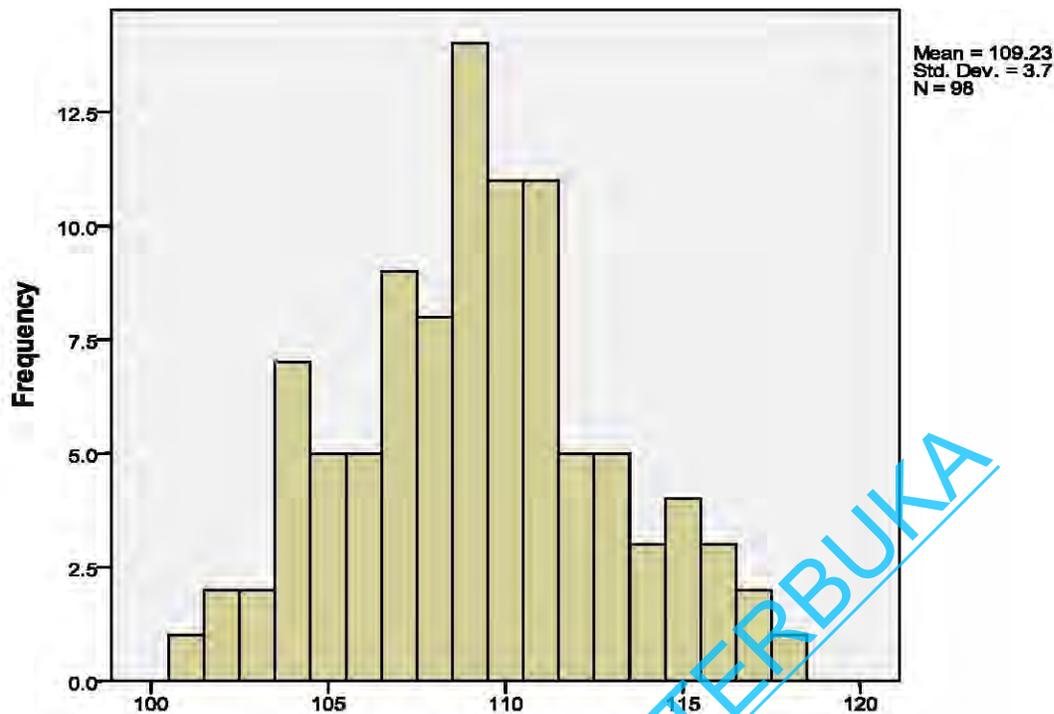
b. Variabel Akuntabilitas (X1)

Hasil pengolahan data pada variabel akuntabilitas dengan menggunakan 30 item pernyataan yang diajukan kepada 98 orang responden dengan total nilai 10705 dengan demikian nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 109,23; median 109,00; modus 109, simpangan baku 3,700, variansi 13,687; rentang 17, nilai minimum 101, dan nilai maksimum 118. Adapun bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogramnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Akuntabilitas (X_1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	101	1	1.0	1.0	1.0
	102	1	1.0	1.0	2.0
	103	1	1.0	1.0	3.1
	104	4	4.1	4.1	7.1
	105	6	6.1	6.1	13.3
	106	6	6.1	6.1	19.4
	107	8	8.2	8.2	27.6
	108	9	9.2	9.2	36.7
	109	15	15.3	15.3	52.0
	110	11	11.2	11.2	63.3
	111	10	10.2	10.2	73.5
	112	9	9.2	9.2	82.7
	113	4	4.1	4.1	86.7
	114	3	3.1	3.1	89.8
	115	4	4.1	4.1	93.9
	116	3	3.1	3.1	96.9
	117	2	2.0	2.0	99.0
	118	1	1.0	1.0	100.0
Total	98	100.0	100.0		

Sumber: Pengolahan Data Primer



Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.2. Histogram Akuntabilitas (X₁)

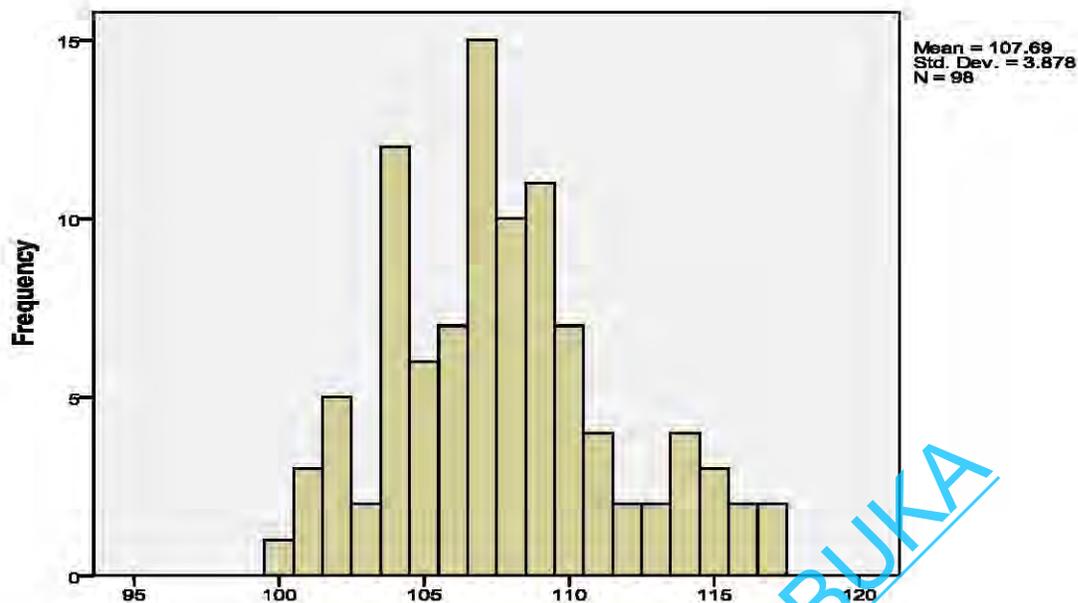
c. Variabel Pengelolaan BOS Sekolah (X₂)

Hasil pengolahan data pada variabel pengelolaan BOS sekolah dengan menggunakan 30 item pernyataan yang diajukan kepada 98 orang responden dengan total nilai 10554, dengan demikian nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 107,69; median 107,00; modus 107; simpangan baku 3,878; variansi 15,039; rentang 17; nilai minimum 100; dan nilai maksimum 117. Adapun bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogramnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pengelolaan BOS Sekolah (X_2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	101	1	1.0	1.0	1.0
	102	2	2.0	2.0	3.1
	103	2	2.0	2.0	5.1
	104	7	7.1	7.1	12.2
	105	5	5.1	5.1	17.3
	106	5	5.1	5.1	22.4
	107	9	9.2	9.2	31.6
	108	8	8.2	8.2	39.8
	109	14	14.3	14.3	54.1
	110	11	11.2	11.2	65.3
	111	11	11.2	11.2	76.5
	112	5	5.1	5.1	81.6
	113	5	5.1	5.1	86.7
	114	3	3.1	3.1	89.8
	115	4	4.1	4.1	93.9
	116	3	3.1	3.1	96.9
	117	2	2.0	2.0	99.0
	118	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Sumber: Pengolahan Data Primer



Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.3. Histogram Pengelolaan Bos (X₂)

4. Pengujian Persyaratan Analisis

Sebelum pengujian analisis jalur, maka diperlukan sejumlah persyaratan tertentu. Misalnya hubungan antara variabel dalam model harus linier sehingga persyaratan ini memenuhi persyaratan analisis regresi dan korelasi. Pengujian persyaratan yang dilakukan diantaranya adalah uji normalitas dan uji homogenitas varians untuk setiap variabel, apabila data masing-masing variabel memenuhi persyaratan normal dan homogenya maka data dapat dilanjutkan dalam uji lanjut yaitu pengujian linieritas regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi.

a. Uji Normalitas

Data yang telah dideskripsikan kemudian diuji normalitasnya. Uji normalitas dilakukan terhadap variabel persepsi *stakeholder*, akuntabilitas dan pengelolaan BOS sekolah dengan menggunakan uji normalitas galat baku taksiran dengan kolmogorov-Smirnov.

Adapun kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas ($\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_1 artinya data berdistribusi tidak normal sedangkan jika probabilitas ($\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Untuk kemudahan perhitungan dalam menguji normalitas data digunakan program SPSS versi 19. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas (perhitungan lengkap pada lampiran persyaratan analisis) didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Signifikan (sig)	Keterangan
Persepsi <i>stakeholder</i>	0.165	Normal
Akuntabilitas	0.134	Normal
Pengelolaan BOS Sekolah	0.084	Normal

Sumber: Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel di atas maka:

- 1) Pada variabel persepsi *stakeholder* nilai signifikansi (sig) sebesar 0.165 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga diputuskan bahwa variabel tersebut memiliki distribusi normal.
- 2) Pada variabel akuntabilitas (sig) sebesar 0.134 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga diputuskan bahwa variabel tersebut memiliki distribusi normal.
- 3) Pada variabel pengelolaan BOS sekolah (sig) sebesar 0.084 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga diputuskan bahwa variabel tersebut memiliki distribusi normal.

Berdasarkan uji normalitas dengan bantuan *software SPSS versi 19* diperoleh gambar PP-Plot dengan titik-titik tidak jauh dari garis lurus dan nilai mean = median = modus serta nilai probabilitas (sig) lebih besar dari 0,05. maka disimpulkan populasi dari semua variabel data penelitian ini, yaitu persepsi, akuntabilitas dan pengelolaan BOS sekolah berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas varians mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen. Dalam penelitian ini, pengujian homogenitas varians dilakukan dengan menggunakan uji Barlett. Adapun kriteria pengujiannya adalah:

Jika $\chi_h^2 < \chi_t^2$ maka homogen

Jika $\chi_h^2 > \chi_t^2$ maka tidak homogen

Berdasarkan perhitungan diperoleh $\chi_h^2 = 0.679492833 < \chi_t^2 (0,95;2) = 5,991$

kesimpulan bahwa ketiga kelompok data berasal dari populasi yang homogen.

Dengan terpenuhi kenormalan dan kehomogenan maka analisis dilanjutkan dengan uji korelasi, uji Regresi sederhana dan kelinieran serta path analisis.

c. Uji Signifikasi Koefisien Regresi dan Linearitas Regresi

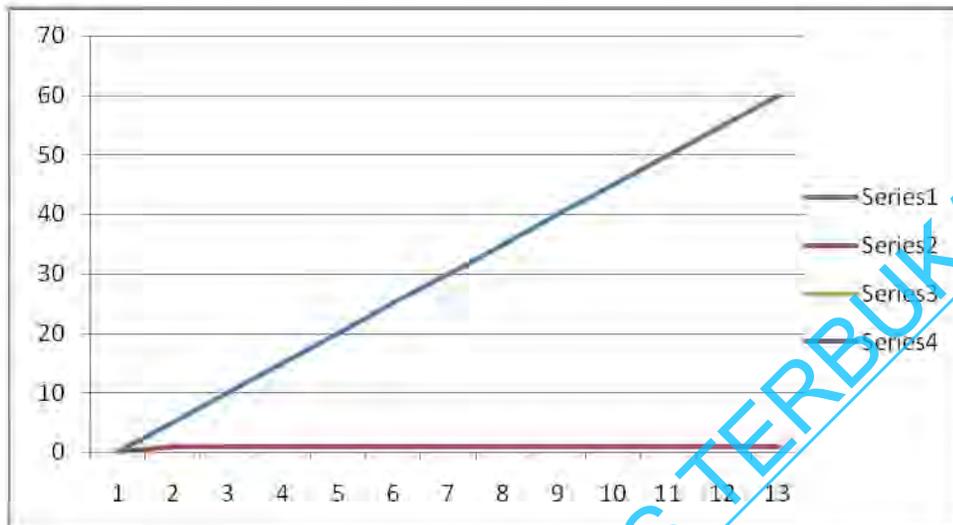
Pengujian signifikan koefisien regresi dan linieritas regresi dilakukan untuk mengetahui model persamaan regresi antara variabel bebas dan variabel terikat serta untuk mengetahui apakah model persamaan berbentuk garis lurus (linier) atau bukan. Pengujian signifikan dan linieritas regresi dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS versi 19. Adapun kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka model persamaan berbentuk garis lurus (linier) dan jika nilai probabilitas (sig) > 0,05 maka model persamaan berbentuk garis lurus (linier) dan jika nilai probabilitas (sig) > 0,05 maka model persamaan tidak berbentuk garis lurus.

5. Hasil Analisis Penelitian

a. Persepsi *stakeholder* (Y) dengan Akuntabilitas BOS Sekolah (X_1)

Berdasarkan hasil perhitungan *software* SPSS versi 19 diperoleh konstanta $a = 14,857$ dan koefisien $b = 0,835$. Sehingga persamaan regresi akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* adalah $Y = 14,857 + 0,835X_1$. Berdasarkan persamaan tersebut berarti setiap penambahan satu

skor akuntabilitas maka akan menambah persepsi *stakeholder* sebesar 0,835 dan dikarenakan nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka model persamaan berbentuk garis lurus. Adapun bentuk persamaan regresi akuntabilitas dengan persepsi *stakeholder* dapat dideskripsikan seperti pada gambar:

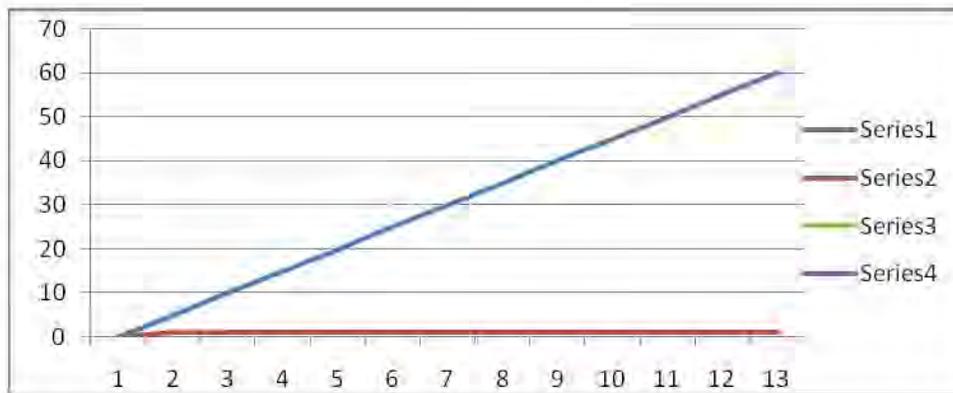


Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.4 Persepsi *Stakeholder* (Y) dengan Akuntabilitas (X_2)

b. Persepsi *Stakeholder* (Y) dengan Pengelolaan BOS (X_2).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 19 diperoleh konstanta $a = 7,858$ dan koefisien $b = 0,912$ sehingga persamaan regresi persepsi *stakeholder* dengan pengelolaan sekolah adalah $Y = 7,858 + 0,912X_2$. Berdasarkan persamaan tersebut berarti setiap penambahan skor pengelolaan BOS sekolah sebesar satu skor maka akan meningkatkan persepsi *stakeholder* sebesar 0,912 dan dikarenakan nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka model persamaan berbentuk garis lurus. Adapun bentuk persamaan regresi persepsi *stakeholder* dengan pengelolaan BOS sekolah dapat dideskripsikan pada gambar:

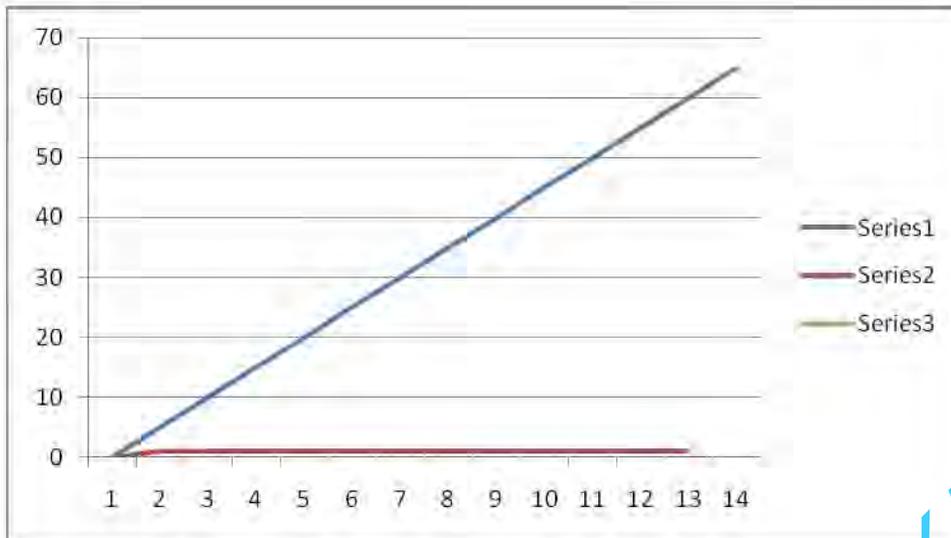


Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.5. Model Persepsi *Stakeholder* (Y) dengan Pengelolaan (X₂).

c. Pengelolaan BOS (X₂) dengan Akuntabilitas (X₁)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 19 diperoleh konstanta $a = 9,501$ Dan koefisien $b = 0,899$ sehingga persamaan regresi akuntabilitas dengan pengelolaan BOS adalah $X_2 = 9,501 + 0,899X_1$. Berdasarkan persamaan tersebut berarti setiap penambahan satu skor akuntabilitas maka akan meningkatkan pengelolaan BOS sebesar 0,899 dan dikarenakan nilai probabilitas (sig) $< 0,05$ maka model persamaan berbentuk garis lurus. Adapun bentuk persamaan regresi akuntabilitas dengan pengelolaan BOS dapat dideskripsikan pada gambar.



Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.6. Pengelolaan BOS (X_2) dengan Akuntabilitas (X_1)

d. Uji korelasi

Pengujian korelasi dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Pengujian korelasi dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS versi 19. Adapun kriteria pengujian adalah: Jika nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan dan Jika nilai probabilitas (sig) > 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan, Hasil pengujian dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 19 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Korelasi antar Variabel

Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
Akuntabilitas dengan Persepsi Stakeholder	0.908	0.00	Signifikan
Pengelolaan BOS dengan Persepsi Stakeholder	0.941	0.00	Signifikan

Akuntabilitas dengan Pengelolaan BOS	0.947	0.00	Signifikan
--------------------------------------	-------	------	------------

Sumber: Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel di atas:

- 1) Koefisien korelasi variabel akuntabilitas dengan persepsi *stakeholder* sebesar 0,908 dan dikategorikan korelasi kuat. Dikarenakan nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antar akuntabilitas dengan persepsi *stakeholder* signifikan.
- 2) Koefisien korelasi variabel pengelolaan BOS dengan persepsi *stakeholder* sebesar 0,941 dan dikategorikan korelasi sangat kuat. Dan dikarenakan nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel pengelolaan BOS dengan persepsi *stakeholder* signifikan.
- 3) Koefisien korelasi variabel akuntabilitas dengan pengelolaan BOS sebesar 0,947 dan dikategorikan korelasi sangat kuat. Dikarenakan nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel akuntabilitas dengan pengelolaan BOS signifikan.

e. Koefisien Determinasi (KD)

Berikut ini hasil pengujian dengan rumus koefisien determinasi $= r^2 \times 100\%$

Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi antar Variabel

Variabel	Koefisien Determinasi	Pengaruh
Akuntabilitas dengan Persepsi <i>Stakeholder</i>	0,824	82,4%
Pengelolaan BOS dengan Persepsi <i>Stakeholder</i>	0,855	85,5%
Akuntabilitas dengan Pengelolaan BOS	0,897	89,7%

Sumber: Pengolahan Data Primer

- 1) Koefisien determinasi variabel akuntabilitas dengan persepsi *stakeholder* sebesar 0,824 atau 82,4%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* sebesar 82,4% sedangkan sisanya sebesar 17,6% dipengaruhi faktor lain.
- 2) Koefisien determinasi variabel pengelolaan BOS dengan persepsi *stakeholder* sebesar 0,855 atau 85,5%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa besarnya pengaruh pengelolaan BOS dengan persepsi *stakeholder* sebesar 85,5% sedangkan sisanya sebesar 14,5% dipengaruhi faktor lain.
- 3) Koefisien determinasi variabel akuntabilitas dengan pengelolaan BOS sebesar 0,897 atau 89,7%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa besarnya pengaruh akuntabilitas dengan pengelolaan BOS sekolah sebesar 89,7% sedangkan sisanya sebesar 10,3% dipengaruhi faktor lain.

6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil uji persyaratan yang ditentukan untuk pengujian hipotesis, seperti normalitas dan homogenitas dari data yang diperoleh telah dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini diajukan tiga hipotesis penelitian, yaitu:

- a. Hipotesis pertama: terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder*, untuk itu disusun hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : p_{31} = 0$$

$$H_1 : p_{31} > 0$$

- b. Hipotesis kedua: terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder*, untuk itu disusun hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : p_{32} = 0$$

$$H_1 : p_{32} > 0$$

- c. Hipotesis ketiga: terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan *stakeholder*, untuk itu disusun hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : p_{12} = 0$$

$$H_1 : p_{12} > 0$$

Adapun kriteria uji hipotesis statistik adalah jika $p > 0,05$ maka signifikan (terdapat pengaruh) dan jika $p < 0,05$ maka tidak signifikan (tidak terdapat pengaruh).

- a. Karena $P_{31} (0,163) > 0,05$ maka terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder*.
- b. Karena $P_{32} (0,719) > 0,05$ maka terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder*.
- c. Karena $P_{21} (0,911) > 0,05$ maka terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan *stakeholder*.

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan.
- b. Terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder* di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan.
- c. Terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan *stakeholder* di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan.

Ringkasan hasil pengujian korelasi antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

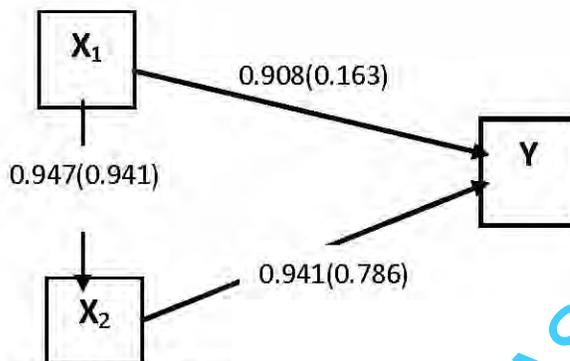
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Koefisien Determinan antar Variabel

Pengaruh	Simbol	Koefisien
----------	--------	-----------

X_1 terhadap Y	P_{31}	0.163
X_2 terhadap Y	P_{32}	0.786
X_1 terhadap X_2	P_{21}	0.941

Sumber: Pengolahan Data Primer

Secara keseluruhan pengaruh yang dibentuk dapat digambarkan pada diagram jalur berikut:



Sumber: Pengolahan Data Primer

Gambar 4.7 Konstelasi

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan suatu kajian terhadap hasil temuan yang ada hubungannya dengan jawaban terhadap permasalahan penelitian Berdasarkan pengolahan data di atas, maka penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Pengelolaan Bos Terhadap Persepsi *Stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan, dapat teruji keberlakuannya, dalam arti bahwa penelitian ini mampu menjawab kebenaran hipotesis yang diajukan.

Adapun pembahasan hasil penelitian secara terperinci dapat dilihat dari uraian berikut:

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa peran akuntabilitas berpengaruh terhadap persepsi *stakeholder* dengan nilai koefisien determinan 0,824. Besarnya pengaruh langsung adalah sebesar 82,4 %. Peran akuntabilitas SMP Negeri Bintan, sebagaimana semua

nilai semua dimensi peran akuntabilitas menunjukkan telah dimainkan secara baik. Persepsi *stakeholder* dikategorikan cenderung menjadi baik. Sebagaimana yang diungkapkan Hamid Muhammad (2007) bahwa yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:

- 1). Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2). Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3). Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholder* di awal setiap tahun anggaran.
- 4). Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholder*.
- 5). Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholder* di akhir tahun.
- 6). Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- 7). Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8). Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan bos kepada otoritas yang lebih tinggi, dan juga kepada masyarakat luas seperti komite sekolah sebagaimana diungkapkan oleh (Haryanto, 2007):

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepada dinas pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang kepala sekolah SMP Negeri 4 Bintan pada tanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut:

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah bersama komite sekolah meningkatkan kerja sama dengan orang tua dan masrakat atau pihak lain untuk menggalang sumber dana. Dana sekarang yang kita kelola adalah dana bos dari orang tua siswa dan masyarakat. Dengan prinsip pengelolaan transparan maka perusahaan yang berada dilingkungan sekolah terdekat dengan senang hati menyumbang dana. (W/Kepala SMPN 4 Bintan).

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa peran pengelolaan BOS berpengaruh terhadap persepsi *stakeholder* dengan nilai koefisien determinan 0,853. Besarnya pengaruh

langsung adalah sebesar 85,3 %. Peran pengelolaan BOS SMP Negeri Bintan, sebagaimana nilai semua dimensi peran pengelolaan menunjukkan telah dimainkan secara baik. Persepsi *stakeholder* dikategorikan cenderung menjadi baik. Sebagaimana yang diungkapkan Bastian (2007: 30)

bahwa dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen BOS pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber BOS organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan BOS dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif.

Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen BOS pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Untuk itu otonomi daerah diharapkan dapat : (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002) dan juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala SMP Negeri 2 Bintan pada tanggal, 13 Maret 2012 sebagai berikut:

Keterlibatan komite sekolah sangat besar disamping pengelolaan manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan kepercayaan yang besar kepada warga masyarakat untuk terlibat langsung, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (W/Kepala SMPN 2 Bintan).

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa peran akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan BOS dengan nilai koefisien determinan 0,897. Besarnya pengaruh langsung adalah sebesar 89,7 %. Peran akuntabilitas SMP Negeri Bintan, sebagaimana nilai semua dimensi peran akuntabilitas menunjukkan telah dimainkan secara baik. Pengelolaan dikategorikan cenderung menjadi baik. Sebagaimana juga disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pendanaan Pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain: 1). Pendanaan

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 2). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. 3). Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 4). Pengalokasian dana pendidikan. Dan juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Waka keuangan SMPN 2 Bintan pada tanggal 24 Maret 2012 sebagai berikut:

Kepala sekolah sangat terbuka masalah keuangan. Wujud akuntabilitas keuangan yaitu guru dan staf ikut rapat yang sudah diagendakan, kami semua diberi kebebasan untuk mengetahui keuangan yang ada pada Kepala sekolah menyampaikan uang masuk dan uang keluar. Dana dan anggaran dilaksanakan secara terbuka, ketika ada bantuan dana bos keuangan yang masuk dipegang oleh bendahara bos dan diketahui oleh komite sekolah, pelaksanaan diberikan kepada program-program yang membutuhkan sesuai prioritas. Kepala sekolah tidak pernah memegang langsung keuangan bos. (W/ Waka Keuangan SMPN 2 Bintan).

Rencana pengembangan sekolah dengan dana bos melibatkan sembilan bidang komite sekolah terdiri dari:

1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dana bos
2. Komite sekolah yang berasal dari Masyarakat.
3. Komite sekolah yang berasal dari dewan guru meliputi:
 - a) Bidang kurikulum dan pembelajaran
 - b) Bidang pengembangan sumber daya manusia
 - c) Bidang Keuangan
 - d) Bidang Kesiswaan
 - e) Bidang Sarana Prasarana
 - f) Bidang Hubungan Masyarakat

Hasil wawancara pada tanggal 05 Maret 2012 dengan salah seorang waka kurikulum pada SMP Negeri 1 Bintan antara lain:

Sasaran program kurikulum melalui dana bos di sekolah kami antara lain: a) menekankan pada terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif; b) Terciptanya iklim sekolah yang nyaman sehingga proses belajar mengajar menjadi tenang dan menyenangkan; c) Penataan sekolah dengan persiapan olimpiade akademik dan nonakademik dan menghadapi UN. Program Pembelajaran remedial dan pengayaan. (W/Waka Kurikulum/ Senin 05 Maret 2012 di ruang waka kurikulum)

Pernyataan ini sesuai dengan pengamatan peneliti ketika peneliti berada dilapangan pada SMP Negeri 1 Bintan di dalam kelas terdapat media pembelajaran seperti: Atlas, Globe, Gambar Penemu-penemu bidang fisika dan matematika, gambar pahlawan.

Hasil wawancara dengan bidang Kesiswaan pada tanggal 07 Maret 2012 dengan salah seorang bidang kesiswaan pada SMP Negeri 4 Bintan antara lain:

Terlaksananya penataan administrasi kesiswaan, terlaksananya lomba mata pelajaran tingkat kecamatan dan kabupaten, terciptanya prestasi olahraga dan seni, penambahan jam belajar khusus untuk persiapan lomba olimpiade, pengembangan bakat dan minat siswa. Dalam penerimaan siswa baru siswa tidak dilibatkan dengan pembiayaan sekecil apapun. Sekolah telah menyiapkan keperluan map, formulir atau atk lainnya. (W/Bidang kesiswaan/ Rabu 07 Maret 2012 di ruang kesiswaan)

Hasil wawancara dengan waka Humas pada tanggal 12 Maret 2012 dengan salah seorang waka Humas pada SMP Negeri 11 Bintan antara lain:

Keterlibatan komite secara langsung bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Salah satu peran komite adalah membantu menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab dan mensejahterakan pegawai, guru sesuai kemampuan yang ada. Tugas humas adalah penyambung tangan antara sekolah dan komite dalam pencarian dana tambahan, mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite, mewakili sekolah hubungan kerja sama dengan instansi lain, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan, seperti bazar dan pameran hasil keterampilan siswa. (W/Bidang Humas/ Senin 12 Maret 2012 di ruang majelis guru).

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat kerja sama antara komite dengan sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, senantiasa pihak sekolah menjalin hubungan dan

kerja sama dengan komite, dengan harapan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMPN 12 Bintan pada tanggal 17 Maret 2012 sebagai berikut:

Ditinjau dari aspek regulasi upaya mendapat bantuan dana baik pemerintah maupun swasta hanya akan terpoenuhi apabila atas persetujuan komite, dengan demikian wadah refresentatif *stakeholder* yang resmi di sekolah adalah komite yang memiliki fungsi dan peran yang strategis antara lain: mitra sekolah dalam hal mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan guna pendukung mutu pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penggunaan dana bos. (W/ Kepala SMPN 12 Bintan)

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah tersebut pelaksanaan evaluasi pencairan dana bos mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam program, agar semua komponen dapat menjiwai penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif pemecahan. Komite secara berkala melakukan rapat koordinasi sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan sekolah menyangkut pengelolaan dana bos.

Hasil wawancara dengan komite sekolah SMPN 9 Bintan yaitu bapak Rahman Hakim pada tanggal 19 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Hubungan komunikasi komite dengan orang tua siswa sangat baik yaitu: memberikan pertimbangan teknis; menyusun RAPBS bersama pihak sekolah; mengkoordinasi sumbangan komite dari orang tua maupun mengakses dana masyarakat lainnya; melaksanakan program komite yang berkaitan dengan kegiatan fisik atau saspras. (W/ komite SMPN 9 Bintan)

Dengan adanya desentralisasi dibidang pendidikan ini, tentunya sekolah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memberdayakan masyarakat terutama dengan komite sekolah dalam mewujudkan tanggung jawab bersama meningkatkan mutu pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami evaluasi sebagai upaya mengemeliner persoalan yang dihadapi sekolah sebagai hambatan dan sekaligus mencari pemecahannya. Pengawasan dan

evaluasi pada hakekatnya juga merupakan bentuk pengendalian terhadap manajemen sekolah menuju efisiensi kegiatan sekolah.

Evaluasi sangat penting dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga pendidikan guna mengetahui seberapa besar kesuksesan yang diraih, mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan sehingga program tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya diadakan perbaikan terus menerus disertai dengan analisa dari berbagai unsur. Berikut penuturan hasil wawancara peneliti dengan Kepala SMPN 17 Bintan pada tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

Melalui monitoring evaluasi inilah kita banyak dapat feedback, guna improvisasi program berikutnya. Siklus ini dilakukan secara terus menerus disertai diskusi dan analisis dari semua unsur, terutama unsur internal. Kerja sama semua stakeholder berupa monitoring pelaksanaan dana bos. (W/ Rabu, 21 Maret 2012 Kepala SMPN 17 Bintan).

Dari paparan di atas jelaslah bahwa monitoring dan evaluasi bukanlah bertujuan untuk menekan semua komponen warga sekolah, tetapi sebaliknya bertujuan untuk menupayakan semua komponen terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hasil wawancara dengan Waka keuangan SMPN 2 Bintan pada tanggal 24 Maret 2012 sebagai berikut:

Kepala sekolah sangat terbuka masalah keuangan. Wujud akuntabilitas keuangan yaitu guru dan staf ikut rapat yang sudah diagendakan, kami semua diberi kebebasan untuk mengetahui keuangan yang ada pada Kepala sekolah menyampaikan uang masuk dan uang keluar. Dana dan anggaran dilaksanakan secara terbuka, ketika ada bantuan dana bos keuangan yang masuk dipegang oleh bendahara bos dan diketahui oleh komite sekolah, pelaksanaan diberikan kepada program-program yang membutuhkan sesuai prioritas. Kepala sekolah tidak pernah memegang langsung keuangan bos. (W/ Waka Keuangan SMPN 2 Bintan, Sabtu 24 Maret).

Dari paparan waka keuangan sumber dana langsung dipegang oleh bendahara bos, kepala sekolah tidak ikut memegang keuangan secara langsung, namun penggunaannya dikordinir oleh kepala sekolah untuk kelancaran kegiatan pembelajaran.

Hasil wawancara Waka Sarana Prasarana pada SMPN 12 Bintan pada tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut:

Dalam pencairan dana keuangan sekolah, kepala sekolah selalu meminta program sarana prasarana, pencairan dana selalu dilibatkan komite yang dibuktikan dengan tanda tangan komite sekolah. Adapun program sarana prasarana dengan pendanaan bos antara lain: pemeliharaan kebersihan gedung dan keindahan lingkungan sekolah, pemeliharaan perlengkapan seperti kursi, meja, atk dan lain-lain (W/ Waka Saspras SMPN 12 Bintan Tanggal 26 Maret 2012)

Kutipan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sarana prasarana merupakan faktor penting dalam proses layanan pendidikan secara optimal, jika kualitas dan kuantitas memenuhi persyaratan, akan menunjang dan memperlancar pengembangan kegiatan proses belajar mengajar siswa, karena salah satu faktor kebersihan terletak pada apa yang menjadi faktor kebutuhan siswa dan guru.

Komite sekolah dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki peranan dalam mengkoordinasi hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Indikator yang bisa dinilai dari komite sekolah terlihat dari peran yang diemban komite sekolah, yaitu sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung. Keempat peran tersebut merupakan bentuk partisipasi yang bisa diberikan masyarakat dan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah, baik berupa ide/ gagasan, tenaga maupun dana.

Hasil penelitian mengenai *stakeholder* atau komite sekolah melalui perhitungan kecenderungan responden dalam menjawab setiap item pernyataan menghasilkan skor rata-rata keseluruhan item sebesar 82,4%. Apabila diinterpretasikan ke dalam ukuran sikap hal ini

menandakan bahwa persepsi stakeholder atau komite sekolah di SMP Negeri Bintan sudah dikatakan baik.

Berikut ini di bahas rincian kerja *stakeholder* atau komite sekolah SMPN Kabupaten Bintan:

- a. Badan pertimbangan. Sebagai badan pertimbangan komite sekolah telah memperlihatkan persepsi kerja yang baik. Artinya komite memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah dengan baik. Hal ini dapat ditandai dengan tersusunnya rencana strategik, rencana operasional sekolah, dan RAPBS oleh kepala sekolah bersama dengan komite sekolah. Selain itu komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, dimana sumber daya yang dimiliki menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan Kemendiknas no 044/U/ 2002 tentang dewan sekolah dan komite sekolah, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) RAPBS; 3) Kriteria Kinerja satuan pendidikan, tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan adalah mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, yang mana sumber daya yang dimiliki akan menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program pendidikan di sekolahnya. Selain itu juga komite sekolah mempunyai fungsi memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan program kurikulum, PBM, maupun dalam penilaian, komite sekolah sebagai badan penasehat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam

pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting sebab dengan berlakunya pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang berkualitas dan kondusif.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan seperti SDM, komite sekolah berfungsi antara lain mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberi pertimbangan mengenai tenaga pendidikan (guru) yang diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan itu sendiri.

Dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan komite sekolah berperan memberikan pertimbangan mengenai sarana prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan teknis mengenai sarana dan prasarana pendidikan.

Penetapan anggaran pendidikan, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap sumber-sumber anggaran pendidikan di daerah. Komite juga memberikan pertimbangan mengenai anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu komite sekolah harus melakukan perannya sebagai badan pertimbangan secara terus menerus dan berkesinambungan, karena hal itu akan sangat membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan program kegiatan yang akan dijalankan. Hadirnya komite sekolah juga dapat membantu pihak sekolah mengetahui potensi yang dimiliki sekolah serta potensi pendidikan yang dimiliki masyarakat yang dapat membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan khusus di SMP Negeri Kabupaten Bintan.

- b. Sebagai bahan pendukung

Komite sekolah sebagai badan pendukung berada dalam kategori baik. Dalam Kemendiknas No 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, peran komite sekolah sebagai badan pendukung adalah: 1) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan; 2) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; 3) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Dari hasil penelitian bahwa peran komite sekolah di SMP Negeri Bintan kurang optimal khususnya dalam pengadaan dana/ fasilitas/ sumber daya yang dibutuhkan, apalagi sejak digulirkan program dana bos. Pada hal anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah sangat terbatas. Hal ini berdampak pada penerimaan bantuan dana bagi sekolah dirasakan sangat kurang. Untuk itu disinilah peran komite sekolah diperlukan dalam memantau kondisi anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Dari hasil pemantauan tersebut komite sekolah dapat membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan dana dengan cara memobilisasi dukungan dana yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam hal pengadaan dana. Pemberdayaan dukungan anggaran yang dilakukan komite sekolah akan dipantau perkembangan melalui evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran tersebut. Oleh karena itu komite harus meningkatkan perannya sebagai badan pendukung. Dalam mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan incidental bersama orang tua dan anggota masyarakat dan juga dengan memotivasi orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan tumbuh perhatian dan

komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di SMP Negeri Kabupaten Bintan.

c. Badan Pengontrol

Dengan perannya sebagai badan pengontrol, komite sekolah berada dalam kategori baik. Komite sekolah selalu melakukan pengawasan dan pengontrolan khususnya terhadap pelaksanaan program sekolah dan anggaran sekolah. Kegiatan pengawasan dan pengontrolan tersebut dimaksudkan agar komite sekolah mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan program sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan juga untuk mengetahui apakah sekolah mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu yang paling penting adalah agar tidak terjadi penyimpangan atas penggunaan dana sekolah. Hal ini sesuai dengan Kemendiknas No.044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, peran komite sekolah badan pengontrol yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Peran komite sebagai pengontrol yaitu melakukan control terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk penilaian kualitas kebijakan dan perencanaan yang ada. Dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah, komite sekolah berperan dalam mengontrol pelaksanaan program yang ada disekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang telah disusun atau tidak. Selain itu juga komite sekolah mengontrol alokasi dana dan sumber daya lain bagi pelaksanaan program sekolah tersebut. Komite sekolah pun berperan dalam melakukan penilaian terhadap hasil pengeluaran pendidikan di sekolah, seperti penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di sekolah. Hasil penilaian terhadap output pendidikan di sekolah dikoordinasikan oleh komite sekolah kepada dewan pendidikan, yang mana hasil penilaian

tersebut akan menjadi masukan bagi dewan pendidikan dalam memetakan persoalan pemerataan dan mutu keluaran pendidikan. Selain itu penilaian ini akan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komite sekolah di SMP Negeri Kabupaten Bintan telah melaksanakan perannya sebagai badan pengontrol dengan baik. Jika hal terus menerus dilakukan, maka kinerja SMP Negeri Kabupaten Bintan akan semakin baik serta adanya tindakan korektif terhadap penyimpangan yang ada.

d. Sebagai badan Penghubung (Mediator)

Keberadaan komite sekolah sangat diperlukan karena bisa menjadi jembatan atau penghubung antara sekolah dengan orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat. Sebagai badan penghubung, komite sekolah telah memperlihatkan kerja yang baik. Aspek yang dinilai dari kinerja komite sekolah ini bisa diidentifikasi dari upaya yang dilakukan komite sekolah dalam mensosialisasikan program penggalan dana/fasilitas/sumberdaya lainnya kepada masyarakat/orang tua siswa, membantu kepala sekolah menyampaikan hasil pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada orang tua atau masyarakat dan pemerintah daerah setempat, menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis mengenai hasil aspirasi, ide, tuntunan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah dan menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah setempat mengenai penambahan anggaran pendidikan bagi sekolah.

Hal itu sesuai kepmendiknas no.044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) adalah:

- a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat
- b. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*mediator agency*) lebih pada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dinas pendidikan. Hal ini dilakukan oleh komite sekolah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan, yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program pendidikan. Hasil penyempurnaan kebijakan dan program pendidikan tersebut harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat, yang mana mensosialisasikan ini juga merupakan tugas komite sekolah.

Disamping itu, komite sekolah berperan menjadi penghubung antar sekolah dengan masyarakat, atau antar sekolah dengan dinas pendidikan. Misalnya saja, komite sekolah dapat berperan dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua yang kurang dapat respon dari sekolah. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat adalah mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan.

Oleh karena itu komite sekolah harus melakukan perannya sebagai badan penghubung secara terus menerus dan berkesinambungan, karena hal itu akan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa ketiga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini secara signifikan dapat diterima. Uraian masing-masing penerimaan ketiga hipotesis adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Persepsi *Stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan.

Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan yang ditunjukkan oleh analisis koefisien jalur (p_{31}) sebesar 0.163 ($0,163 > 0,05$). Pola hubungan antar kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $Y = 14,857 + 0,853X_1$. Persamaan ini memberikan informasi bahwa setiap perubahan satu skor akuntabilitas terjadi peningkatan persepsi *stakeholder* sebesar 0,853. Hasil analisis korelasi (r_{13}) sebesar 0.791 antara akuntabilitas dengan persepsi *stakeholder* kuat dan positif, artinya makin baik akuntabilitas BOS makin baik pula persepsi *stakeholder* dan makin buruk akuntabilitas makin buruk pula persepsi *stakeholder*.

Besarnya kontribusi variabel akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* diketahui dengan cara mengkuadratkan perolehan nilai koefisien korelasi yang disebut koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,853 Secara statistik nilai ini memberi pengertian bahwa 85,3% variasi persepsi *stakeholder* ditentukan oleh akuntabilitas dan sisanya 14,7% dipengaruhi faktor lain. Pola hubungan fungsional ditunjukkan oleh persamaan tersebut .

2) Pengaruh Pengelolaan BOS terhadap Persepsi *Stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan.

Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder* di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan yang ditunjukkan oleh analisis koefisien jalur (p_{32}) sebesar 0,719. Pola hubungan antar kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $Y = 7,858 + 0,912X_2$. Persamaan ini memberikan informasi bahwa setiap perubahan satu skor pengelolaan BOS terjadi peningkatan persepsi

stakeholder sebesar 0,912. Hasil analisis korelasi (r_{23}) sebesar 0,843 artinya antara pengelolaan BOS dengan persepsi *stakeholder* sangat kuat dan positif, artinya makin baik pengelolaan BOS makin baik pula persepsi *stakeholder* dan makin buruk pengelolaan BOS makin buruk pula persepsi *stakeholder*. Besarnya kontribusi variabel pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder* diketahui dengan cara mengkuadratkan perolehan nilai koefisien korelasi yang disebut koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,853. Secara statistik nilai ini memberi pengertian bahwa 85,3% variasi persepsi *stakeholder* ditentukan oleh pengelolaan BOS dan dengan pola hubungan fungsional ditunjukkan oleh persamaan regresi tersebut di atas.

3) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan BOS SMP Negeri Kabupaten Bintan.

Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bintan yang ditunjukkan oleh (p_{21}) sebesar 0,786. Pola hubungan antar kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $X_2 = 5,081 + 0,938X_1$. Persamaan ini memberikan informasi bahwa setiap perubahan satu skor akuntabilitas terjadi peningkatan pengelolaan BOS sebesar 0,938. Hasil analisis korelasi (r_{12}) sebesar 0,911 artinya antara akuntabilitas dengan pengelolaan BOS sangat kuat dan positif, artinya makin baik akuntabilitas makin baik pengelolaan BOS dan makin buruk akuntabilitas makin buruk pula pengelolaan BOS sekolah. Besarnya kontribusi variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan BOS diketahui dengan cara mengkuadratkan perolehan nilai koefisien korelasi yang disebut koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,897. Secara statistik nilai ini memberi pengertian bahwa 89,7% variasi pengelolaan BOS ditentukan oleh akuntabilitas dengan pola hubungan fungsional ditunjukkan oleh persamaan regresi tersebut di atas.

C. Keterbatasan Penelitian.

Meskipun perhitungan demi perhitungan telah sesuai dengan prosedur yang ada dan memperoleh hasil sesuai dengan hipotesis yang diajukan, namun masih banyak keterbatasan yang dirasakan dalam penelitian ini pada umumnya disebabkan oleh:

1. Waktu yang digunakan untuk mengisi angket yang kurang tepat, guru-guru tengah disibukkan oleh ujian mid semester, terobosan dan persiapan tray out III sehingga menyebabkan kelelahan dan kejenuhan. Dalam kondisi seperti ini menyebabkan perasaan dan pikiran guru kurang berkonsentrasi untuk menjawab perasaan dan pikiran guru kurang berkonsentrasi untuk menjawab pertanyaan instrumen dengan baik bahkan cenderung responden mengisi instrumen hanya untuk memuaskan perasaan peneliti.
2. Ketidakbiasaan responden menjadi objek penelitian menyebabkan sedikit keragu-raguan dalam merespon kuesioner yang diberikan, banyak responden yang minta kejelasan dan konsekuensi dari hasil jawaban walaupun telah diberi pengarahan dan penjelasan tentang maksud dan tujuannya yang diharapkan responden benar-benar memberikan respon secara jujur dan objektif.
3. Jumlah responden yang digunakan hanya 98 responden, kendati jumlah ini sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan penelitian namun sampel dalam jumlah kecil tidak bisa memberikan suatu gambaran lengkap tentang kondisi sebenarnya.
4. Instrumen wawancara tidak semua *stakeholder* yang dapat penulis mewawancarai, karena pihak sekolah sedang sibuk mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional kelas IX. Sehingga tidak semua terwakili pada responden yang diteliti.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder*

Hasil analisis koefisien jalur (*path analisis*) menunjukkan bahwa makin tinggi akuntabilitas akan diiringi dengan meningkatnya persepsi *stakeholder* dan makin rendah akuntabilitas makin rendah persepsi *stakeholder*. Besarnya kontribusi variabel akuntabilitas terhadap persepsi *stakeholder* ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,824 yang berarti 82,4% variasi nilai persepsi *stakeholder* ditentukan oleh akuntabilitas dan sisanya 17,6% dipengaruhi oleh faktor lain yakni sistem yang menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi, serta nilai-nilai yang dianutnya.

2. Terdapat pengaruh langsung pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder*

Hasil analisis koefisien jalur (*path analisis*) menunjukkan bahwa makin tinggi pengelolaan BOS akan diiringi dengan meningkatnya persepsi *stakeholder* dan makin rendah pengelolaan BOS makin rendah persepsi *stakeholder*. Besarnya kontribusi variabel pengelolaan BOS terhadap persepsi *stakeholder* ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,853 yang berarti 85,3% variasi nilai persepsi *stakeholder* ditentukan oleh pengelolaan BOS dan sisanya 14,7% dipengaruhi oleh faktor lain yakni asas transparansi dan akuntabilitas.

3. Terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan BOS sekolah.

Hasil analisis koefisien jalur (*path analysis*) menunjukkan bahwa makin tinggi akuntabilitas BOS sekolah akan diiringi dengan meningkatnya pengelolaan BOS sekolah dan makin rendah akuntabilitas makin rendah pengelolaan BOS sekolah. Besarnya koefisien variabel akuntabilitas BOS sekolah terhadap pengelolaan BOS sekolah ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,897 yang berarti 89,7% variasi nilai akuntabilitas ditentukan oleh pengelolaan BOS sekolah dan sisanya 10,3% ditentukan oleh faktor lain yakni aspek transparansi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan komitmen kepala sekolah pada pelaksanaan dana BOS sebagai berikut:

1. Untuk menjamin akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana, sebaiknya ditetapkan bahwa sekolah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada komite sekolah. Selain itu, sekolah juga harus memberikan informasi kepada masyarakat, setidaknya dengan menempelkan ringkasan laporan di papan pengumuman sekolah dan membagikan salinannya kepada orang tua murid dan guru.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan komitmen Kepala Sekolah terhadap akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Hal ini memberi induksi bahwa persepsi *stakeholder* dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan akuntabilitas BOS sekolah dan pengelolaannya. Peningkatan persepsi *stakeholder* dapat ditingkatkan dengan partisipasi *stakeholder* secara langsung dalam mengelola BOS sekolah.
3. Perlunya disusun pedoman perilaku yang mengatur perilaku Kepala Sekolah beserta jajarannya, serta ditanda tangani pernyataan kesanggupan menerapkan pedoman perilaku tersebut.

4. Untuk pengembangan ilmu, penelitian lanjutan untuk mengungkap lebih detail dari masing-masing variabel dalam penelitian ini perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka

- Asngari. 1984. *Perceptions of District Extension Directors*. East Texas: State University. Jurnal. <http://blog.binadarma.ac.id/effendi>.
- Atkinson dan Hilgard. 1991. *From Learning Theory Connectionist Theory*. California: Brooke Publishing.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah Sebagai Basis Kualitas Pendidikan*, Jakarta: Konferensi Guru Indonesia
- Bartol and Bartol. 1994. *Auditor's and Investor's Perception of the expectation Gab, Accounting Horizon Vol 15 No 4*
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan
- Chaplin, J.P. 1998. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darma.Surya. 2007. *Manajemen Keuangan sekolah, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Davidoff, L. L. 1988. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jilid 1. Edisi Ke-2. Alih bahasa: Mari Juniati. Jakarta: Erlangga.
- Gray, R. 2001. "Thirty Years of Social Accounting, Reporting, and Auditing: what (if anything) have we learnt?" *Business Ethics: A European Review*, Vol. 10, No.1
- Gibson. 1986. *The Ecological Approach to Visual Perception*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Gibson and Donely. 1994. *The Official Publication of the Association of Physical Plants Administrator of Universitas and Colleges*. USA: Association
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Halim Abdul . (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba
- Harsojo. 1977. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Bina Cipta.
- Jalaludin Rahmad. 1998. *Belajar Cerdas*. Bandung: MLC Ujung Berung
- Jalal, F dan Supriyadi,D. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Kasim. 1993. *Prilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Kreitner, Robert, dan Angelo Kinicki. 1989. *Organizational Behavior*. Chicago: Irwin.
- Lestari. 1999. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Rekayasa Kurikulum Akuntansi*. Makalah Akuntansi, Malang.
- Leavitt, H. J. 1997. *Psikologi Manajemen. Edisi Ke-4. Alih Bahasa: Muslichah Zarkasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi
- Mardiasmo. "Otonomi Daerah sebagai upaya memperkuat Perekonomian Daerah", *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th I No. 4, Juni 2002
- Muhammad, H amid, 2005. *Ilmu Pengetahuan Alam. Materi Pelatihan Terintegrasi*. Jakarta : DepDikNas Dirjen DikDasMen
- Muhammad, H amid. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama*.
- Mulyasa. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Rosda karya
- _____ 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nanang Fattah .2003. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Robbins.Stephen P , 2001. *Perilaku Organisasi. Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jilid 1. Edisi Ke-8. A lih Bahasa: H adyana P ujaatmaka & B enyamin Molan*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- _____ .2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Ruch. 1967. *Physiology and Biophysics*. Singapore: Mac Graw Hill Book Co.

- Sabri. 1993. *Persepsi Ulama Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press. Jurnal.
- Sabardi, Agus, Pengantar Manajemen, UPP Akademi Manajemen Perusahaan, YKKL, Yogyakarta, 1997.
- Sri Tjahjorini, Sugiharto. 2001. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sobur Alex . 2003. *Psikologi Umum*. Bandung. Pustaka Setia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Susanti. 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Suryana. Deden. 2008. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bandung: Rosdakarya
- Thoha, M. 1999. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Rosdakarya.
- _____ 1988. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Walgito, B. 1991. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____ 2003. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Wahid. 1993. *Assesment Dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Yusuf. 1991. *Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Yuwono dkk. 2006. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

B. Dokumen Lain dan Perundang-Undangan

- Aryanti. 1995. *Persepsi Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jend. Sudirman Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jend. Sudirman. Purwokerto.

- Asyikin, Jumirin. Tesis. 2001. *Persepsi Kepala Instansi Pemerintah Terhadap Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Kinerja*. Yogyakarta: UGM.
- BSNP. 2006. *Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP
- Depdiknas. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Depdiknas
- Kemendiknas. 2011. *Petunjuk teknis penggunaan Dana BOS*. Jakarta: Dirjendikdas Kemendiknas
- Permendiknas Nomor 44 Tahun 2003, *Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*
- PP No 105 Tahun 2000. *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, 2000
- Safwirdi. Tesis. 2005. *Analisis, Pelaporan Keuangan Sektor Publik untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi Akuntabilitas Publik dan Good Governance (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta)*, UGM.
- Santoso. Puji B, Tesis. 2005. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Pembiayaan dan efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: UGM
- Undang-Undang Sisdiknas Edisi revisi*, 2010. Jakarta: Fokus media

Lampiran 7

HASIL PENELITIAN**1. PERHITUNGAN STATISTIK PENELITIAN**

a. Modus, median, mean, standar deviasi dan varians data

		Statistics		
		X2	X1	Y
N	Valid	98	98	98
	Missing	0	0	0
Mean		121.50	120.26	122.74
Median		120.00	120.00	121.00
Mode		120	120	120
Std. Deviation		11.570	11.553	11.500
Variance		133.861	133.470	132.254
Skewness		.196	.169	.232
Std. Error of Skewness		.244	.244	.244
Kurtosis		.432	-.391	-.487
Std. Error of Kurtosis		.483	.483	.483
Range		53	54	52
Minimum		96	94	98
Maximum		149	148	150
Sum		11907	11785	12029

A. PERSEPSI STAKEHODER (Y)

1). Distribusi Frekuensi

Rentang (r) : $150 - 98 = 52$

Banyak Kelas (K) : $1 + 3.3 \log 98 = 1 + 3.3 (1.991226) = 1 + 6.571046 = 7.571046$

K ditetapkan 7

$$\text{Panjang Kelas (i)} = \frac{r}{K} = \frac{52}{7} = 7.428571; \text{ i ditetapkan } 7$$

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL PERSEPSI STAKEHOLDER (Y)

Interval	Nilai Tengah	Frekuensi (f)
97 – 103	100	3
104 – 110	107	11
111 – 117	114	19
118 – 124	121	23
125 – 131	128	10
132 – 138	135	2
139 – 145	142	1
146 – 152	148	
Jumlah		98

Daftar Distribusi Frekuensi Kumulatif dengan Bantuan Software SPSS Versi 19

VARIABEL PERSEPSI STAKEHOLDER

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	98	1	1.0	1.0	1.0
	101	1	1.0	1.0	2.0
	102	1	1.0	1.0	3.1
	104	2	2.0	2.0	5.1
	106	2	2.0	2.0	7.1
	107	1	1.0	1.0	8.2
	108	2	2.0	2.0	10.2
	109	2	2.0	2.0	12.2
	110	2	2.0	2.0	14.3
	111	3	3.1	3.1	17.3
	112	3	3.1	3.1	20.4
	113	5	5.1	5.1	25.5
	115	2	2.0	2.0	27.6
	116	3	3.1	3.1	30.6
	118	4	4.1	4.1	34.7
	119	4	4.1	4.1	38.8
120	8	8.2	8.2	46.9	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	121	5	5.1	5.1	52.0
	122	2	2.0	2.0	54.1
	123	5	5.1	5.1	59.2
	124	1	1.0	1.0	60.2
	125	3	3.1	3.1	63.3
	126	2	2.0	2.0	65.3
	127	1	1.0	1.0	66.3
	128	2	2.0	2.0	68.4
	129	4	4.1	4.1	72.4
	130	3	3.1	3.1	75.5
	132	1	1.0	1.0	76.5
	133	4	4.1	4.1	80.6
	134	2	2.0	2.0	82.7
	135	2	2.0	2.0	84.7
	136	2	2.0	2.0	86.7
	138	2	2.0	2.0	88.8
	139	1	1.0	1.0	89.8
	140	2	2.0	2.0	91.8
	141	2	2.0	2.0	93.9
	142	2	2.0	2.0	95.9
143	1	1.0	1.0	96.9	
147	1	1.0	1.0	98.0	
148	1	1.0	1.0	99.0	
150	1	1.0	1.0	100.0	
	Total	98	100.0	100.0	

B. VARIABEL AKUNTABILITAS (X1)

1). Distribusi Frekuensi

Rentang (r) : $150 - 98 = 52$

Banyak Kelas (K) : $1 + 3.3 \log 98 = 1 + 3.3 (1.991226) = 1 + 6.571046 = 7.571046$

K ditetapkan 7

$$\text{Panjang Kelas (i)} = \frac{r}{K} = \frac{52}{7} = 7.428571; \text{ i ditetapkan } 7$$

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL AKUNTABILITAS (X_1)

Interval	Nilai Tengah	Frekuensi (f)
97 – 103	100	3
104 – 110	107	11
111 – 117	114	19
118 – 124	121	23
125 – 131	128	10
132 – 138	135	2
139 – 145	142	1
146 – 152	148	
Jumlah		98

VARIABEL AKUNTABILITAS (X_1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	94	1	1.0	1.0	1.0
	99	2	2.0	2.0	3.1
	100	1	1.0	1.0	4.1
	101	1	1.0	1.0	5.1
	102	2	2.0	2.0	7.1
	104	1	1.0	1.0	8.2
	106	3	3.1	3.1	11.2
	107	2	2.0	2.0	13.3
	108	2	2.0	2.0	15.3
	109	4	4.1	4.1	19.4
	110	3	3.1	3.1	22.4
	111	2	2.0	2.0	24.5
	112	3	3.1	3.1	27.6
	113	2	2.0	2.0	29.6
	114	1	1.0	1.0	30.6
	115	1	1.0	1.0	31.6
	116	5	5.1	5.1	36.7
	117	3	3.1	3.1	39.8
118	5	5.1	5.1	44.9	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	119	4	4.1	4.1	49.0
	120	9	9.2	9.2	58.2
	122	4	4.1	4.1	62.2
	123	3	3.1	3.1	65.3
	124	1	1.0	1.0	66.3
	125	2	2.0	2.0	68.4
	126	2	2.0	2.0	70.4
	127	1	1.0	1.0	71.4
	128	4	4.1	4.1	75.5
	129	1	1.0	1.0	76.5
	130	2	2.0	2.0	78.6
	131	5	5.1	5.1	83.7
	132	2	2.0	2.0	85.7
	135	2	2.0	2.0	87.8
	136	2	2.0	2.0	89.8
	137	2	2.0	2.0	91.8
	138	1	1.0	1.0	92.9
	139	2	2.0	2.0	94.9
	140	2	2.0	2.0	96.9
	143	1	1.0	1.0	98.0
147	1	1.0	1.0	99.0	
148	1	1.0	1.0	100.0	
	Total	98	100.0	100.0	

C. VARIABEL PENGELOLAAN BOS (X2)

1). Distribusi Frekuensi

Rentang (r) : $150 - 98 = 52$

Banyak Kelas (K) : $1 + 3.3 \log 98 = 1 + 3.3 (1.991226) = 1 + 6.571046 = 7.571046$

K ditetapkan 7

$$\text{Panjang Kelas (i)} = \frac{r}{K} = \frac{52}{7} = 7.428571; \text{ i ditetapkan 7}$$

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL PENGELOLAAN BOS (X2)

Interval	Nilai Tengah	Frekuensi (f)
97 – 103	100	3
104 – 110	107	11
111 – 117	114	19
118 – 124	121	23
125 – 131	128	10
132 – 138	135	2
139 - 145	142	1
146 - 152	148	
Jumlah		98

VARIABEL PENGELOLAAN BOS (X2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	96	1	1.0	1.0	1.0
	100	2	2.0	2.0	3.1
	102	1	1.0	1.0	4.1
	103	2	2.0	2.0	6.1
	104	1	1.0	1.0	7.1
	105	1	1.0	1.0	8.2
	106	1	1.0	1.0	9.2
	107	2	2.0	2.0	11.2
	108	1	1.0	1.0	12.2
	109	2	2.0	2.0	14.3
	110	4	4.1	4.1	18.4
	111	3	3.1	3.1	21.4
	112	3	3.1	3.1	24.5
	113	1	1.0	1.0	25.5
	114	3	3.1	3.1	28.6
	115	2	2.0	2.0	30.6
	117	4	4.1	4.1	34.7
118	5	5.1	5.1	39.8	
119	6	6.1	6.1	45.9	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	120	8	8.2	8.2	54.1
	121	2	2.0	2.0	56.1
	122	2	2.0	2.0	58.2
	123	2	2.0	2.0	60.2
	124	4	4.1	4.1	64.3
	125	1	1.0	1.0	65.3
	126	2	2.0	2.0	67.3
	127	3	3.1	3.1	70.4
	128	1	1.0	1.0	71.4
	129	4	4.1	4.1	75.5
	130	1	1.0	1.0	76.5
	131	1	1.0	1.0	77.6
	132	4	4.1	4.1	81.6
	133	1	1.0	1.0	82.7
	134	3	3.1	3.1	85.7
	136	2	2.0	2.0	87.8
	137	1	1.0	1.0	88.8
	138	2	2.0	2.0	90.8
	139	2	2.0	2.0	92.9
	140	1	1.0	1.0	93.9
141	3	3.1	3.1	96.9	
145	1	1.0	1.0	98.0	
148	1	1.0	1.0	99.0	
149	1	1.0	1.0	100.0	
	Total	98	100.0	100.0	

2. LAMPIRAN UJI PERSYARATAN

1. UJI NORMALITAS DENGAN LILIFORS

$$\bar{X}_1 = 122.74 \quad S = 11,570$$

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}_i}{S}$$

VARIABEL PERSEPSI STAKEHOLDER (Y)

X_i	Z_i	$F(Z_i)$	$S(Z_i)$	$F(Z_i) - S(Z_i)$
	1	1.0	1.0	1.0
101	1	1.0	1.0	2.0
102	1	1.0	1.0	3.1
104	2	2.0	2.0	5.1
106	2	2.0	2.0	7.1
107	1	1.0	1.0	8.2
108	2	2.0	2.0	10.2
109	2	2.0	2.0	12.2
110	2	2.0	2.0	14.3
111	3	3.1	3.1	17.3
112	3	3.1	3.1	20.4
113	5	5.1	5.1	25.5
115	2	2.0	2.0	27.6
116	3	3.1	3.1	30.6
118	4	4.1	4.1	34.7
119	4	4.1	4.1	38.8
120	8	8.2	8.2	46.9
121	5	5.1	5.1	52.0
122	2	2.0	2.0	54.1
123	5	5.1	5.1	59.2
124	1	1.0	1.0	60.2
125	3	3.1	3.1	63.3
126	2	2.0	2.0	65.3
127	1	1.0	1.0	66.3
128	2	2.0	2.0	68.4
129	4	4.1	4.1	72.4
130	3	3.1	3.1	75.5
132	1	1.0	1.0	76.5

X_i	Z_i	$F(Z_i)$	$S(Z_i)$	$F(Z_i) - S(Z_i)$
133	4	4.1	4.1	80.6
134	2	2.0	2.0	82.7
135	2	2.0	2.0	84.7
136	2	2.0	2.0	86.7
138	2	2.0	2.0	88.8
139	1	1.0	1.0	89.8
140	2	2.0	2.0	91.8
141	2	2.0	2.0	93.9
142	2	2.0	2.0	95.9
143	1	1.0	1.0	96.9
147	1	1.0	1.0	98.0
148	1	1.0	1.0	99.0
150	1	1.0	1.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Persepsi	98	100.0%	0	.0%	98	100.0%
Akuntabilitas	98	100.0%	0	.0%	98	100.0%
Pengelolaan	98	100.0%	0	.0%	98	100.0%

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Persepsi	.0737	98	.200*	.990	98	.662
Akuntabilitas	.070	98	.200*	.983	98	.253
Pengelolaan	.0721	98	.200*	.988	98	.506

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Tests of Normality^{b,c,d}

	Akuntabilitas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Persepsi	100	.260	2	.			
	101	.385	3	.	.750	3	.000
	102	.421	5	.004	.727	5	.018
	103	.376	6	.008	.666	6	.003
	104	.221	7	.200*	.893	7	.289
	105	.235	7	.200*	.918	7	.453
	106	.273	8	.082	.931	8	.527
	107	.281	9	.038	.898	9	.240
	108	.235	8	.200*	.925	8	.469
	109	.158	8	.200*	.941	8	.621
	110	.275	7	.119	.856	7	.139
	111	.324	6	.049	.810	6	.072
	112	.291	5	.193	.833	5	.147
	113	.295	4	.	.857	4	.250
	114	.178	4	.	.989	4	.951
	115	.349	3	.	.832	3	.194
116	.321	3	.	.881	3	.328	

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

b. Persepsi is constant when akuntabilitas = 99. It has been omitted.

c. Persepsi is constant when akuntabilitas = 117. It has been omitted.

d. Persepsi is constant when akuntabilitas = 118. It has been omitted.

2. HOMOGENITAS

Kriteria pengujian : Jika $\chi_h^2 < \chi_i^2$ maka homogen

Jika $\chi_h^2 > \chi_i^2$ maka tidak homogen

Tabel Uji Barlett

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X2	98	53	96	149	11907	121.50	11.570	133.861
X3	98	52	98	150	12029	122.74	11.500	132.254
X1	98	54	94	148	11785	120.26	11.553	133.470
Valid N (listwise)	98							

Sampel	db= n-1	S_i^2	$\log S_i^2$	db.log S_i^2
X1	98 - 1 = 97	11.570	1.063333	103.1433
X2	98 - 1 = 97	11.500	1.060698	102.8877
X3	98 - 1 = 97	11.553	1.062695	103.0814
Jumlah				309.1124

$$S^2 = \frac{(n_1 S_1^2) + (n_2 S_2^2) + (n_3 S_3^2)}{n_1 + n_2 + n_3} = \frac{(97 \times 11,57) + (97 \times 11,50) + (97 \times 11,553)}{97 + 97 + 97} = \frac{3358,431}{291} = 11,541$$

$$\log S^2 = \log 11,541 = 1,062243$$

$$B = (\log S^2) \cdot \sum (n_i - 1) = 1,062243 \times 290 = 308,0506$$

$$\begin{aligned} \chi_{hitung}^2 &= (\ln 10) \left[B - \sum (db) \log S_i^2 \right] \\ &= 2,302585 (308,0506 - 309,1124) \\ &= \end{aligned}$$

$$\chi_h^2 = 2,697 < \chi_r^2(0,95;2) = 5,991$$

Kesimpulan : ketiga kelompok data berasal dari populasi yang homogeny

3. UJI REGRESI SEDERHANA

a. AKUNTABILITAS (X_1) atas PERSEPSI STAKEHOLDER (Y)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	AKUNTABILITAS	.	Enter

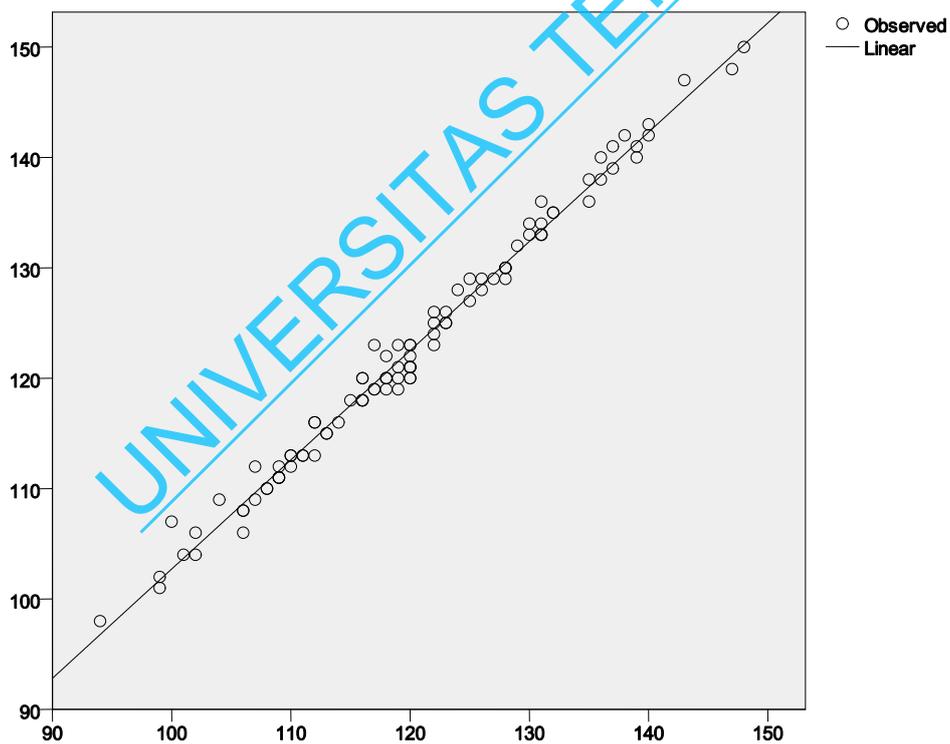
- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: PERSEPSI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 ^a	.988	.988	1.263

- a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS

GRAFIK LINIER X1 ATAS Y



Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	AKUNTABILITAS	.	Enter

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12675.566	1	12675.566	7950.386	.000 ^a
	Residual	153.056	96	1.594		
	Total	12828.622	97			

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS

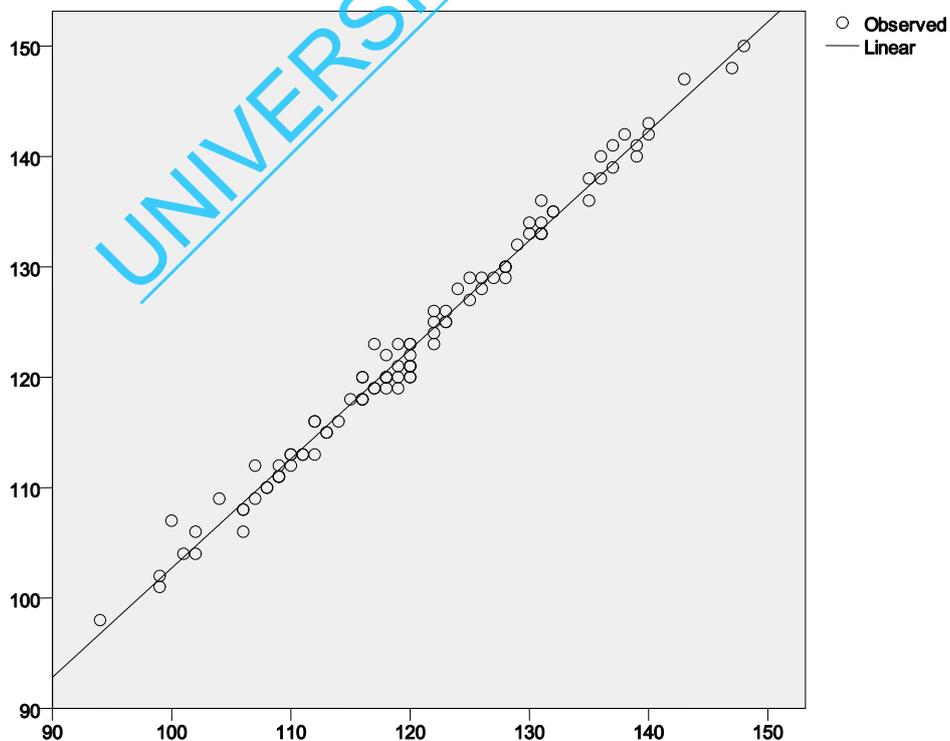
b. Dependent Variable: PERSEPSI

Coefficients^a

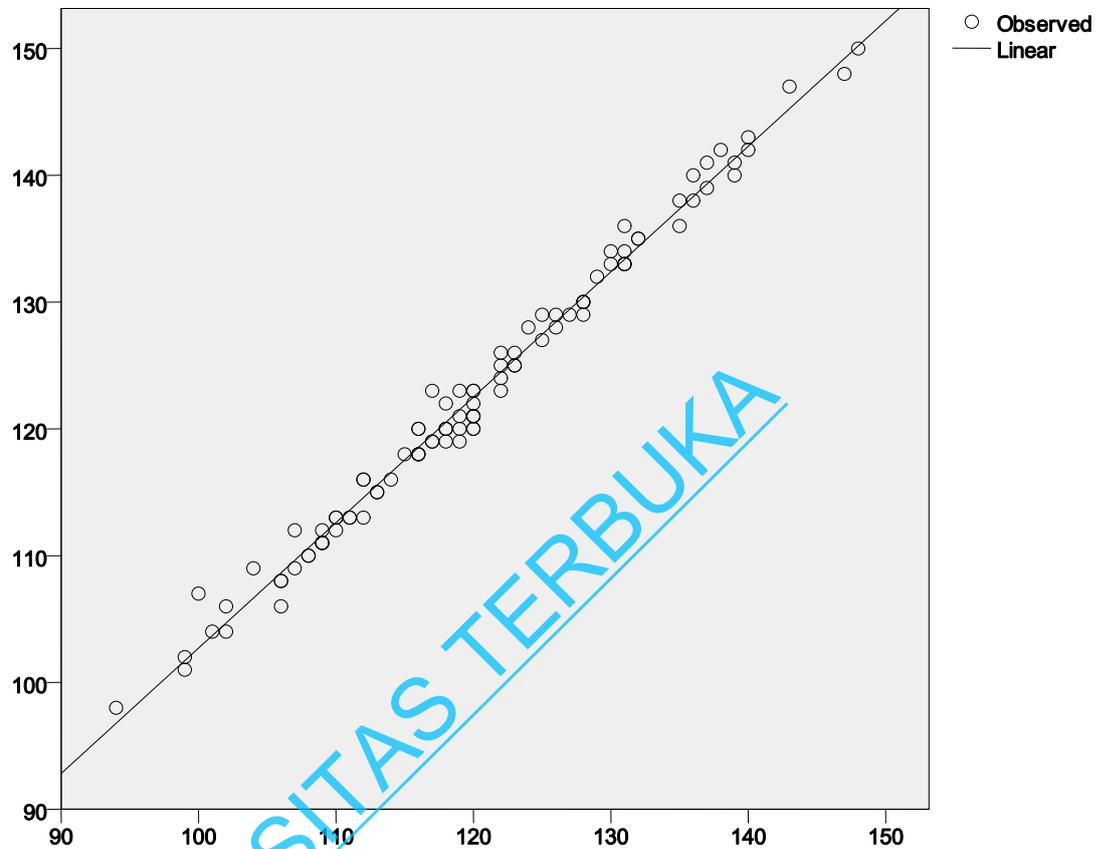
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.755	1.341		2.801	.006
	AKUNTABILITAS	.989	.011	.994	89.165	.000

a. Dependent Variable: PERSEPSI

GRAFIK LINIER VARIABEL X2



GRAFIK LINIER VARIABEL X1 ATAS Y



b. VARIABEL PERSEPSI (Y) ATAS PENGELOLAAN BOS (X2)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.998 ^a	.995	.995	.785

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.998 ^a	.995	.995	.785

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12769.398	1	12769.398	20698.690	.000 ^a
	Residual	59.224	96	.617		
	Total	12828.622	97			

a. Predictors: (Constant), X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.255	.841		2.681	.009
	X2	.992	.007	.998	143.870	.000

a. Dependent Variable: X3

c. AKUNTABILITAS (X1) ATAS PENGELOLAAN BOS (X2)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: X2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 ^a	.995	.995	.791

a. Predictors: (Constant), X1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12858.346	1	12858.346	20534.450	.000 ^a
	Residual	60.114	96	.626		
	Total	12918.459	97			

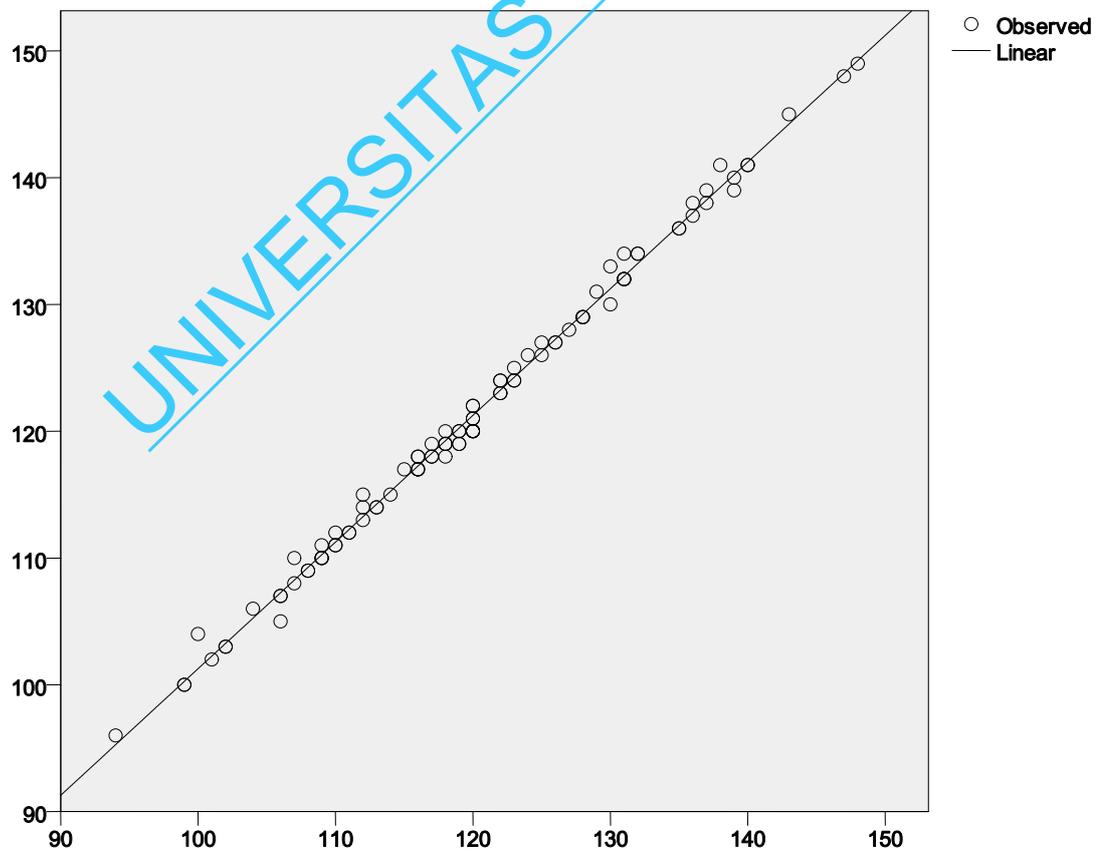
a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.344	.842		1.596	.114
	X1	.999	.007	.998	143.298	.000

a. Dependent Variable: X2



4. UJI KORELASI

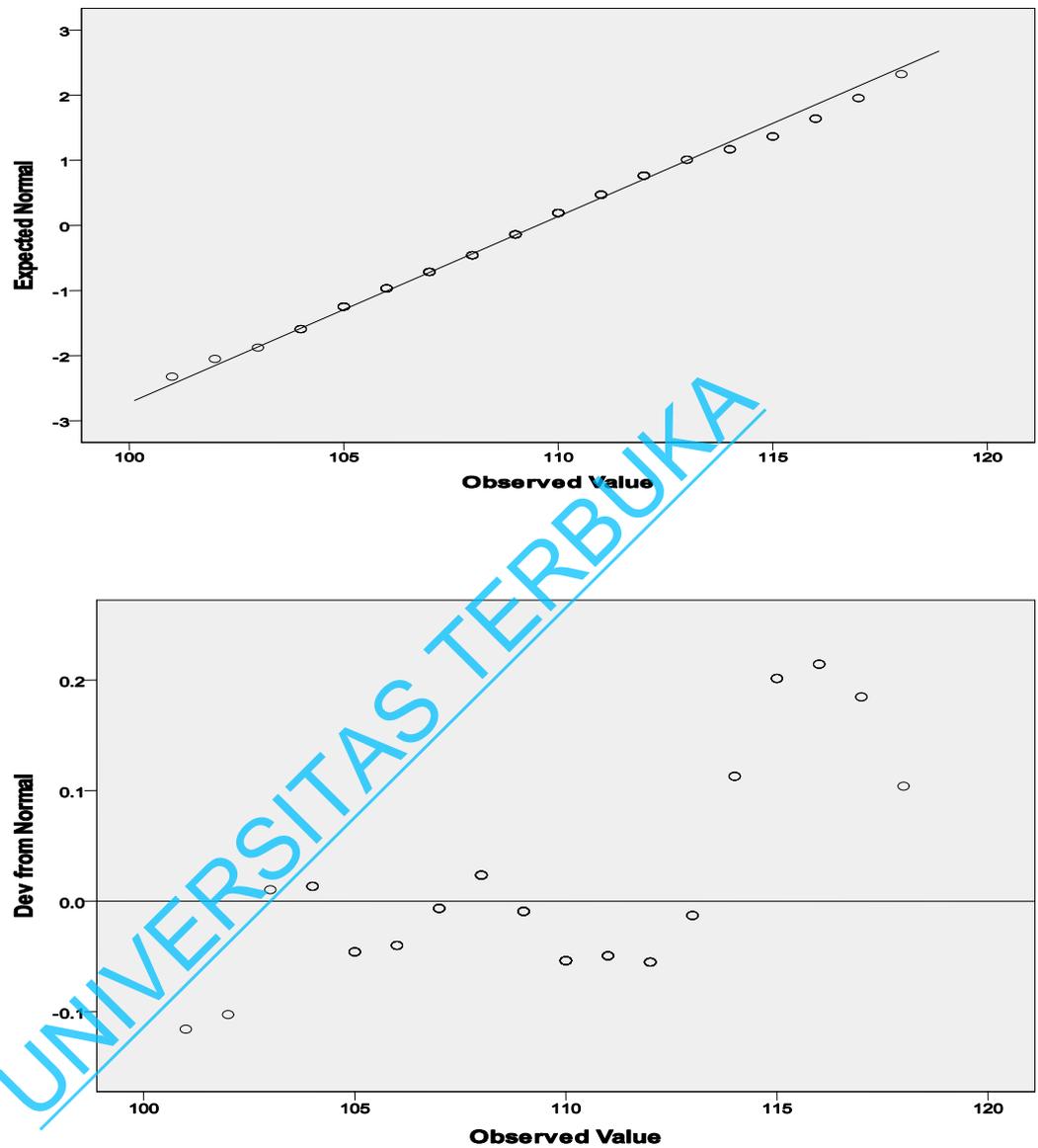
Correlations

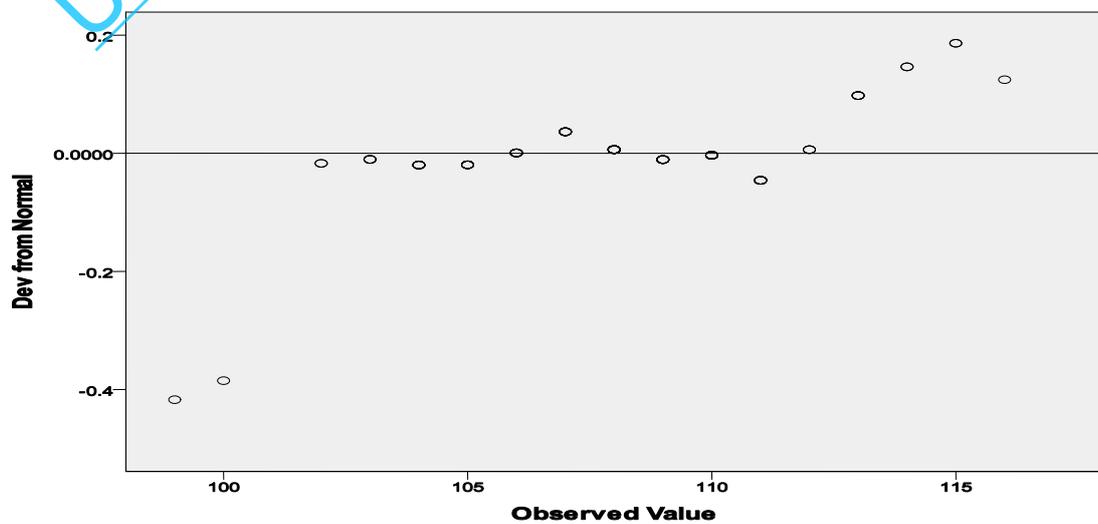
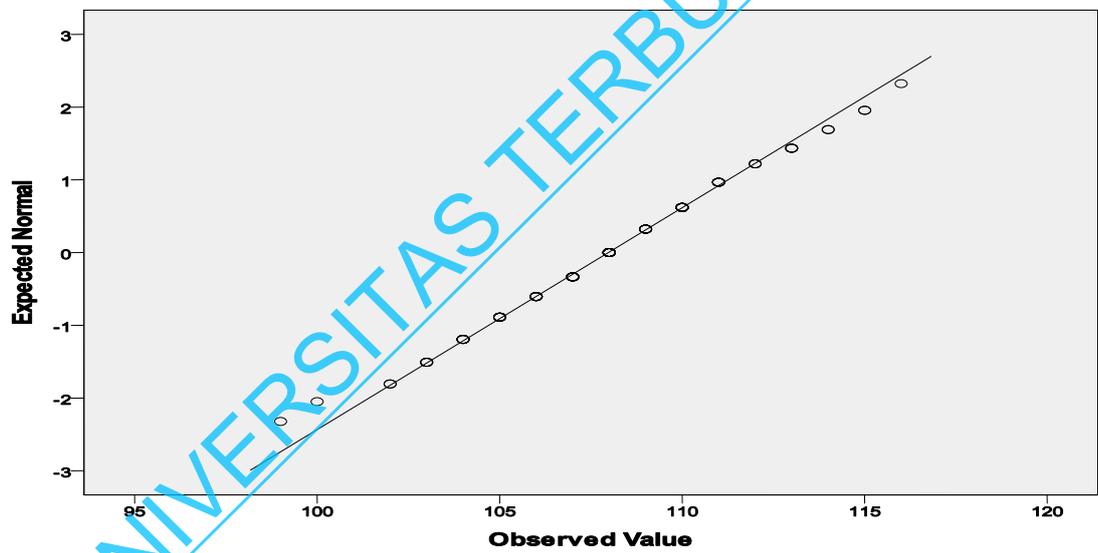
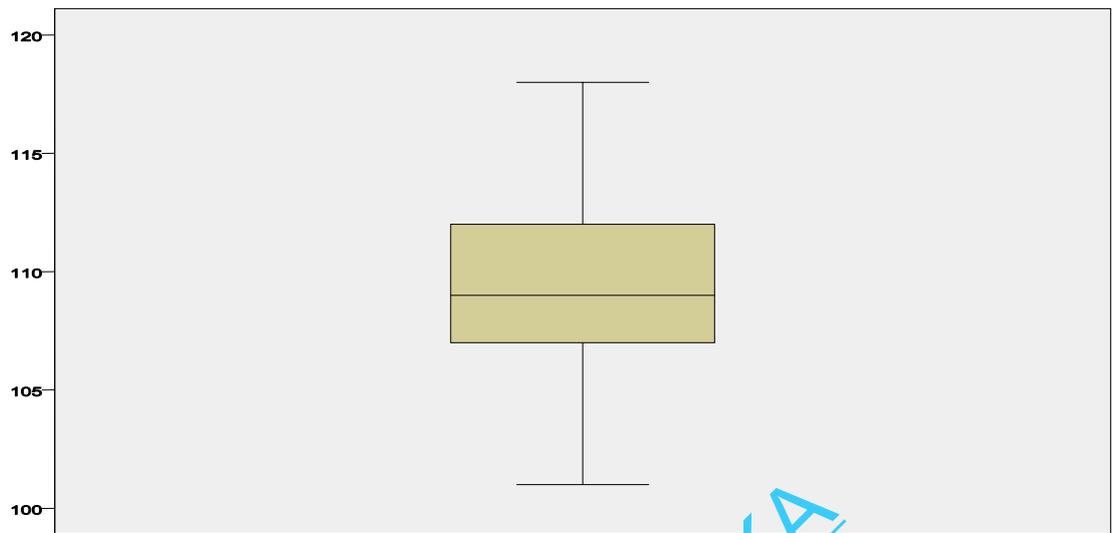
		X1	X3	X2
X1	Pearson Correlation	1	.994**	.998**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	98	98	98
Y	Pearson Correlation	.994**	1	.998**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	98	98	98
X2	Pearson Correlation	.998**	.998**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	98	98	98

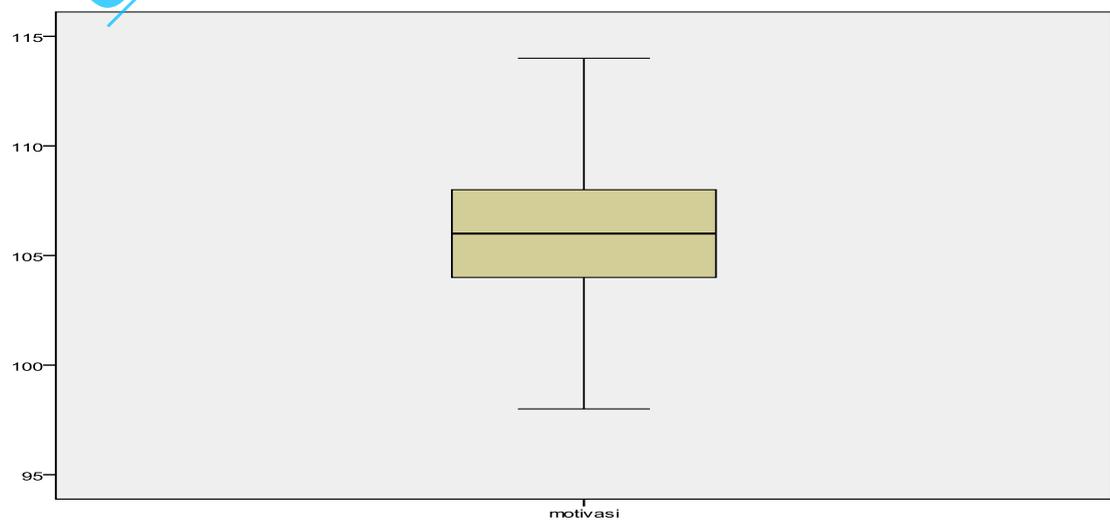
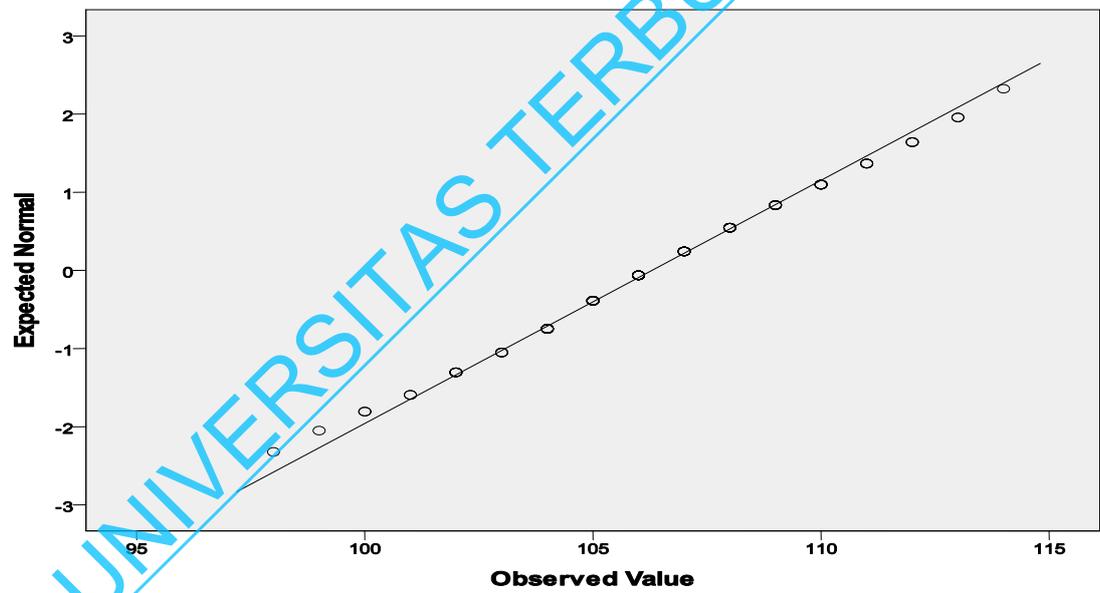
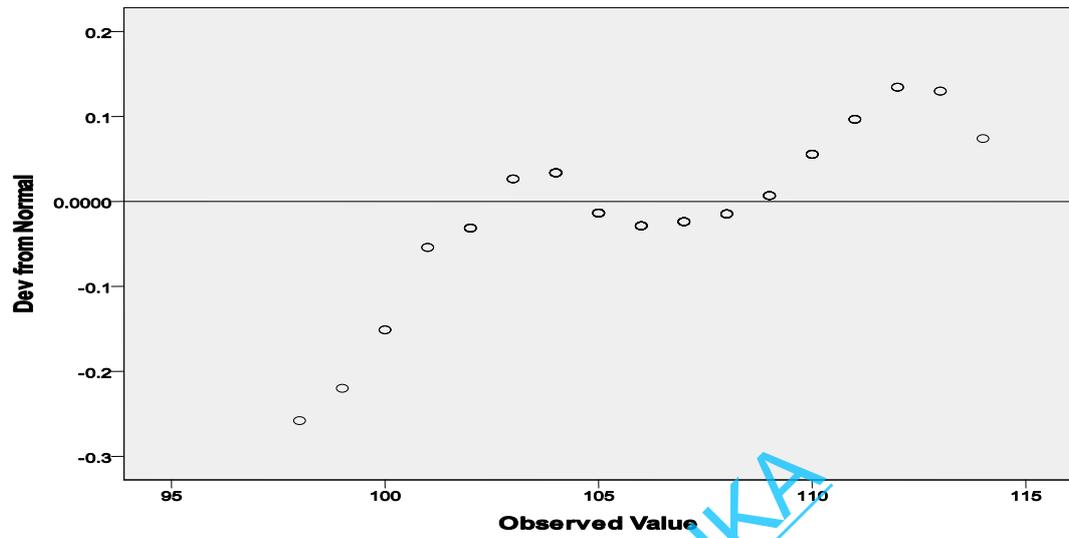
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Uji Normalitas DENGAN QQ Plot







b. Uji Koefisien Determinan

1) Variabel X1 atas Y

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.824	.822	1.357

a. Predictors: (Constant), X1

2) VARIABEL X2 atas Y

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

3) VARIABEL X1 atas X2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.884	1.094

a. Predictors: (Constant), X2

4) VARIABEL X2 ATAS X1

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: X2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.897	.896	1.072

a. Predictors: (Constant), X1

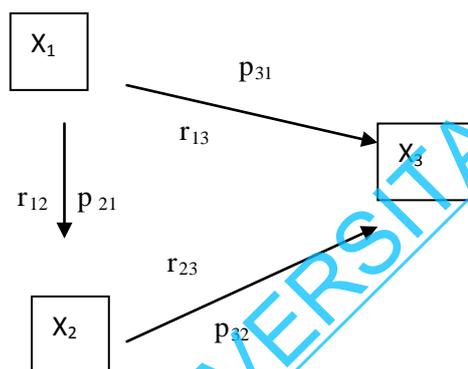
5. UJI KORELASI

Correlations

		X1	X2	X3
X1	Pearson Correlation	1	.947**	.908**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	98	98	98
X2	Pearson Correlation	.947**	1	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	98	98	98
X3	Pearson Correlation	.908**	.941**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Perhitungan analisis jalur



Matrik koefisien korelasi

	X_1	X_2	X_3
X_1	1	r_{12}	r_{13}
X_2		1	r_{23}
X_3			1

	X ₁	X ₂	X ₃
X ₁	1	0,947	0,908
X ₂		1	0,941
X ₃			1

Menghitung koefisien jalur dari matrik korelasi

$$r_{12} = p_{21} \dots\dots\dots 1$$

$$r_{13} = p_{31} + p_{32}r_{12} \dots\dots\dots 2$$

$$r_{23} = p_{31} r_{12} + p_{23} \dots\dots\dots 3$$

bila $p < 0,05$ berarti signifikan

(Prof. Dr. H/ R. Santosa Murwani. 2005. Diktat: Analisis Jalur. Jakarta:UNJ, hh. 2-5)

Uji Hipotesis

Dari ketiga persamaan tersebut dapat dihitung

$$0,947 = p_{21} \dots\dots\dots (1)$$

$$0,908 = p_{31} + 0,947 p_{32} \dots\dots\dots (2)$$

$$0,941 = 0,947 p_{31} + p_{23} \dots\dots\dots (3)$$

Dengan determinan matrik diperoleh

(1)

$$\begin{vmatrix} 0,908 & 0,947 \\ 0,941 & 1 \end{vmatrix}$$

$$p_{31} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0,947 \\ 0,947 & 1 \end{vmatrix}$$

$$0,908 \times 1 - 0,941 \times 0,947$$

$$p_{31} = \frac{\quad}{\quad} = 0,352$$

$$1 \times 1 - 0,947 \times 0,947$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0,908 \\ 0,941 & 0,941 \end{vmatrix}$$

$$p_{32} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0,947 \\ 0,947 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1 \times 0,941 - 0,941 \times 0,908$$

$$p_{32} = \frac{\quad}{\quad} = 0,3069$$

$$1 \times 1 - 0,947 \times 0,947$$

$$p_{21} = 0,457 \dots\dots\dots (1)$$

Dengan demikian secara keseluruhan dapat diperoleh

$p_{21} =$	0,998	$> 0,005$	Hipotesis 3 teruji
$p_{31} =$	0,501	$> 0,005$	Hipotesis 1 teruji
$p_{32} =$	0,489	$> 0,005$	Hipotesis 2 teruji

Lampiran 8

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Anda selaku wakil bidang kurikulum, apakah anda selaku pengembang kurikulum sekolah menggunakan dana bos, kalau ya. Apa saja sasaran program yang telah anda susun?
2. Anda selaku wakil bidang kesiswaan, apakah anda selaku pengembangan aktivitas siswa, sekolah menggunakan dana bos, kalau ya. Apa saja sasaran program kegiatan kesiswaan telah anda susun menggunakan dana bos?
3. Anda selaku wakil bidang humas, sejauhmana keterlibatan anda menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Dan apa peran humas dan komite dalam memajukan kuantitas dan kualitas sekolah?
4. Anda selaku kepala sekolah, apa upaya anda dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah anda. Seberapa besar peran komite sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah dan mendorong orang tua serta masyarakat untuk memajukan sekolah?
5. Anda selaku komite sekolah, seberapa besar peran anda bekerja sama dengan orang tua siswa serta masyarakat untuk mensukseskan program sekolah. Apakah anda terlibat dalam menyusun program sekolah terutama terkait RAPBS? Apakah anda memonitor pelaksanaan program sekolah yang telah disusun dalam RAPBS?
6. Anda selaku wakil bidang keuangan bos sekolah. Apakah pihak sekolah sudah akuntabilitas serta terbuka dalam penggunaan anggaran dana bos, apakah penggunaan dana bos disampaikan secara terbuka dan akuntabilitas pada orang tua, masyarakat dan pada komite sekolah?
7. Apakah anda selaku wakil bidang sarana dan prasarana terlibat dalam penggunaan dana bos, program apa saja yang telah anda anggarkan terkait sarana dan prasarana sekolah dalam penggunaan dan bos?

Lampiran 9

SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan nomor 471 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMP Negeri, susunan organisasi SMP Negeri adalah sebagai berikut:

I. KEPALA SEKOLAH

1. Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran di SMP.
2. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kesiswaan
3. Mengatur penyelenggaraan pembinaan kesiswaan
4. Melakukan bimbingan dan penilaian bagi Guru, tenaga pendidikan lainnya dan Tata Usaha SMP Negeri.
5. Mengatur penyelenggaraan administrasi Sekolah
6. Merencanakan pengembangan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
7. Mengatur keuangan sekolah dan penyusunan RAPBS
8. Menyusun program kerja Sekolah
9. Mengatur kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan penilaian dan proses belajar mengajar serta bimbingan penyuluhan
10. Mengatur pelaksanaan hubungan sekolah dan lingkungan, orang tua dan masyarakat
11. Mengatur tugas-tugas lain yang diberikan atasannya

II. WAKIL KEPALA SEKOLAH

1. Mewakili Kepala Sekolah dalam hal-hal tertentu
2. Mewakili Kepala dalam mengatur dan Mengawasi penyelenggaraan Kesiswaan
3. Mewakili dalam mengatur penyelenggaraan administrasi
4. Membantu menyusun program sekolah
5. Membantu kepala dalam kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar serta bimbingan dan penyuluhan
6. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses belajar mengajar
7. Mengkoordinir seluruh kegiatan PKM, Wali kelas, BP, Pramuka dan OSIS
8. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala sekolah

III. URAIAN TUGAS PARA PKM

PKM KURIKULUM

1. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan program pendidikan
2. Mengatur dan menyusun bahan pengajaran dan pengembangan kurikulum
3. Meneliti kewenangan guru dan pengembangan mutu guru
4. Menyusun perincian guru
5. Menyusun jadwal kegiatan
6. Menyusun Evaluasi belajar siswa
7. Menyusun laporan pelaksanaan pengajaran secara berkala
8. Pembinaan administrasi guru
9. Melaksanakan koordinasi kerja dengan wali kelas, guru dan SMP dilingkungan MGMP SMP Negeri
10. Mengkoordinir pelaksanaan MGMP
11. Mengkoordinir dan meneliti buku pegangan guru

12. Menyimpan seperangkat Kurikulum / GBPP

PKM KESISWAAN

1. Menyusun program pembinaan siswa
2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa / OSIS
3. Memberi pengarahan dan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi
4. Membimbing pelaksanaan upacara hari senin dan upacara lainnya
5. Mengawasi pelaksanaan tata tertib Sekolah
6. Mengatur pembagian kelas
7. Mengkoordinir kegiatan para Pembina Ekstrakurikuler
8. Mengawasi kegiatan Para Pembina Ekstrakurikuler dari awal semester sampai dengan akhir semester
9. Pengecekan absen siswa dalam penyelesaiannya

PKM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS):

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan kerjasama Sekolah dengan lingkungan / masyarakat, instansi terkait dan dunia kerja
2. Melaksanakan kegiatan kerjasama / dengan sekolah SMP lain
3. Merencanakan dan melaksanakan kunjungan kerumah orangtua siswa
4. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan Komite Sekolah

PKM BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING:

1. Menyusun program bimbingan dan penyuluhan / BP
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa

3. Memberi layanan kepada siswa yang lulus dalam memberikan gambaran untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi / MA / SMA / SMEA / SMK
4. Mengadakan koordinasi dengan wali kelas, wakil kepala urusan ke siswaan dan orang tua / wali siswa
5. Memberikan bimbingan, BK kepada para wali kelas

PKM SARANA PRASARANA

1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan barang inventaris
2. Mencatat dan mengimpetarisir barang impentris sekolah
3. Mengusulkan kelengkapan administrasi sekolah
4. Mengusulkan kelengkapan sarana prasarana sekolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 10

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Rencana pengembangan sekolah dengan dana bos melibatkan sembilan bidang komite sekolah terdiri dari:

1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dana bos
2. Komite sekolah yang berasal dari Masyarakat.
3. Komite sekolah yang berasal dari dewan guru meliputi:
4. Bidang kurikulum dan pembelajaran
5. Bidang pengembangan sumber daya manusia
6. Bidang Keuangan
7. Bidang Kesiswaan
8. Bidang Sarana Prasarana
9. Bidang Hubungan Masyarakat

Hasil wawancara pada tanggal 05 Maret 2012 dengan salah seorang waka kurikulum pada SMP Negeri 1 Bintan antara lain:

Sasaran program kurikulum melalui dana bos di sekolah kami antara lain: a) menekankan pada terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif; b) terciptanya iklim sekolah yang nyaman sehingga proses belajar mengajar menjadi tenang dan menyenangkan; c) Penataan sekolah dengan persiapan olimpiade akademik dan nonakademik dan menghadapi UN. Program Pembelajaran Remedial dan pengayaan. (W/Waka Kurikulum/ Senin 05 Maret 2012 di ruang waka kurikulum)

Pernyataan ini sesuai dengan pengamatan peneliti ketika peneliti berada dilapangan pada SMP Negeri 1 Bintan di dalam kelas terdapat media pembelajaran seperti: Atlas, Globe, Gambar Penemu-penemu bidang fisika dan matematika, gambar pahlawan.

Hasil wawancara dengan bidang Kesiswaan pada tanggal 07 Maret 2012

dengan salah seorang bidang kesiswaan pada SMP Negeri 4 Bintang antara lain:

Terlaksananya pe nataan ad ministrasi ke siswaan, terlaksananya lomba mata pelajaran tingkat kecamatan dan kabupaten, terciptanya prestasi olahraga dan seni, penambahan jam belajar khusus untuk persiapan lomba olimpiade, pengembangan bakat dan minat siswa. Dalam penerimaan siswa baru siswa tidak dilibatkan dengan pembiayaan sekecil apapun. Sekolah telah menyiapkan keperluan map, formulir atau ATK lainnya. (W/Bidang kesiswaan/ Rabu 07 Maret 2012 di ruang kesiswaan)

Hasil wawancara dengan waka Humas pada tanggal 12 Maret 2012

dengan salah seorang waka Humas pada SMP Negeri 11 Bintang antara lain:

Keterlibatan komite secara langsung bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Salah satu peran komite adalah membantu menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab dan mensejahterakan pegawai, guru sesuai kemampuan yang ada. Tugas humas adalah menyambungkan antara sekolah dan komite dalam pencarian dana tambahan, mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite, mewakili sekolah hubungan ke raja sama dengan instansi lain, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan, seperti bazar dan pameran hasil keterampilan siswa. (W/Bidang Humas/ Senin 12 Maret 2012 di ruang majelis guru).

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat kerja sama antara komite dengan sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, senantiasa pihak sekolah menjalin hubungan dan kerjasama dengan komite, dengan harapan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Bintang pada tanggal, 13

Maret 2012 sebagai berikut:

Keterlibatan komite sekolah sangat besar disamping pengelolaan manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan kepercayaan yang besar kepada warga masyarakat untuk terlibat langsung, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (W/Kepala SMPN 2 Bintan)

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 4 Bintan pada tanggal 15 Maret 2012 sebagai berikut:

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah bersama komite sekolah meningkatkan kerjasama dengan orangtua dan masyarakat atau pihak lain untuk menggalang sumber dana. Dana sekarang yang kita kelola adalah dana BOS dari orangtua siswa dan masyarakat, dengan prinsip pengelolaan transparan maka perusahaan yang berada di lingkungan sekolah terdekat dengan senang hati menyumbang dana. (W/Kepala SMPN 4 Bintan)

Hasil wawancara dengan Kepala SMPN 12 Bintan pada tanggal 17 Maret 2012 sebagai berikut:

Ditinjau dari aspek regulasi upaya mendapat bantuan dana baik pemerintah maupun swasta hanya akan terpenuhi apabila atas persetujuan komite, dengan demikian adalah representatif stakeholder yang resmi di sekolah adalah komite yang memiliki fungsi dan peran yang strategis antara lain: mitra sekolah dalam hal mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan guna pendukung mutu pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penggunaan dana BOS. (W/ Kepala SMPN 12 Bintan)

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah tersebut pelaksanaan evaluasi pencairan dana BOS mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam program, agar semua komponen dapat menjiwai penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif pemecahan. Komite secara berkala melakukan rapat koordinasi sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan sekolah menyangkut pengelolaan dana BOS.

Hasil wawancara dengan komite sekolah SMPN 9 Bintan yaitu bapak Rahman Hakim pada tanggal 19 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Hubungan komunikasi komite dengan orang tua siswa sangat baik yaitu: memberikan pertimbangan teknis; menyusun RAPBS bersama pihak sekolah; mengkoordinasi sumbangan komite dari orang tua maupun mengakses dana masyarakat lainnya; melaksanakan program komite yang berkaitan dengan kegiatan fisik atau saspras. (W/ komite SMPN 9 Bintang)

Dengan adanya desentralisasi dibidang pendidikan ini, tentunya sekolah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memberdayakan masyarakat terutama dengan komite sekolah dalam mewujudkan tanggung jawab bersama meningkatkan mutu pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami evaluasi sebagai upaya mengemuliner persoalan yang dihadapi sekolah sebagai hambatan dan sekaligus mencari pemecahannya. Pengawasan dan evaluasi pada hakekatnya juga merupakan bentuk pengendalian terhadap manajemen sekolah menuju efisiensi kegiatan sekolah.

Evaluasi sangat penting dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga pendidikan guna mengetahui seberapa besar kesuksesan yang diraih, mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan sehingga program tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya diadakan perbaikan terus menerus disertai dengan analisa dari berbagai unsur. Berikut penuturan hasil wawancara peneliti dengan Kepala SMPN 17 Bintang pada tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

Melalui monitoring evaluasi inilah kita banyak dapat feedback, guna improvisasi program berikutnya. Siklus ini dilakukan secara terus menerus disertai diskusi dan analisis dari semua unsur, terutama unsur internal. Kerja sama semua stakeholder berupa monitoring pelaksanaan dan bos. (W/ R abu, 21 Maret 2012 Kepala SMPN 17 Bintang)

Dari paparan di atas jelaslah bahwa monitoring dan evaluasi bukanlah bertujuan untuk menekan semua komponen anggaran sekolah, tetapi sebaliknya bertujuan untuk mengupayakan semua komponen terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hasil wawancara dengan Waka keuangan SMPN 2 Bintan pada tanggal 24 Maret 2012 sebagai berikut:

Kepala sekolah sangat terbuka masalah keuangan. Wujud akuntabilitas keuangan yaitu guru dan staf ikut rapat yang sudah diagendakan, kami semua diberi kebebasan untuk mengetahui keuangan yang ada pada Kepala sekolah menyampaikan uang masuk dan uang keluar. Dana dan anggaran dilaksanakan secara terbuka, ketika ada bantuan dana BOS keuangan yang masuk dipegang oleh bendahara BOS dan diketahui oleh komite sekolah, pelaksanaan diberikan kepada program-program yang membutuhkan sesuai prioritas. Kepala sekolah tidak pernah memegang langsung keuangan BOS. (W/ Waka Keuangan SMPN 2 Bintan, Sabtu 24 Maret).

Dari paparan waka keuangan sumber dana langsung dipegang oleh bendahara BOS, kepala sekolah tidak ikut memegang keuangan secara langsung, namun penggunaannya di koordinir oleh kepala sekolah untuk kelancaran kegiatan pembelajaran.

Hasil wawancara Waka Sarana Prasarana pada SMPN 12 Bintan pada tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut:

Dalam pencairan dana keuangan sekolah, kepala sekolah selalu meminta program sarana prasarana, pencairan dana selalu melibatkan komite yang dibuktikan dengan tanda tangan komite sekolah. Adapun program sarana prasarana dengan pendanaan BOS antara lain: pemeliharaan kebersihan gedung dan keindahan lingkungan sekolah, pemeliharaan perlengkapan seperti kursi, meja, alat dan lain-lain (W/ Waka Sarpras SMPN 12 Bintan Tanggal 26 Maret 2012)

Kutipan dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sarana prasarana merupakan faktor penting dalam proses layanan pendidikan secara optimal, jika kualitas dan kuantitas memenuhi persyaratan, akan menunjang dan memperlancar pengembangan kegiatan proses belajar mengajar siswa, karena salah satu faktor keberhasilan terletak pada apa yang menjadi faktor kebutuhan siswa dan guru.

Komite sekolah dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki peranan dalam mengkoordinasi hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Indikator yang bisa dinilai dari komite sekolah terlihat dari peran yang diemban komite sekolah, yaitu sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung. Keempat peran tersebut merupakan bentuk partisipasi yang bisa diberikan masyarakat dan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah, baik berupa ide/gagasan, tenaga maupun dana.

Hasil penelitian mengenai *stakeholder* atau komite sekolah melalui perhitungan kecenderungan responden dalam menjawab setiap item pernyataan menghasilkan skor rata-rata ke seluruh item sebesar 82,4%. Apabila diinterpretasikan ke dalam ukuran sikap hal ini menandakan bahwa persepsi stakeholder atau komite sekolah di SMP Negeri Bintan sudah dikatakan baik.

Berikut ini dibahas rincian kerja stakeholder atau komite sekolah SMPN Kabupaten Bintan:

- a. Badan pertimbangan. Sebagai badan pertimbangan komite sekolah telah memperlihatkan persepsi kerja yang baik. Artinya komite memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah dengan baik. Hal ini dapat

ditandai dengan tersusunnya rencana strategis, rencana operasional sekolah, dan RAPBS oleh kepala sekolah bersama dengan komite sekolah. Selain itu komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, di mana sumber daya yang dimiliki menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan Kemendiknas no 044/U/2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) RAPBS; 3) Kriteria Kinerja satuan pendidikan, tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan adalah mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, yang mana sumber daya yang dimiliki akan menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program pendidikan di sekolahnya. Selain itu juga komite sekolah mempunyai fungsi memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

Dalam pelaksanaan program kurikulum, PBM, maupun dalam penilaian, komite sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting sebab dengan berlakunya

pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang berkualitas dan kondusif.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan seperti SDM, komite sekolah berfungsi antara lain mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberi pertimbangan mengenai tenaga pendidikan (guru) yang diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan itu sendiri.

Dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan, komite sekolah berperan memberikan pertimbangan mengenai sarana prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan teknis mengenai sarana dan prasarana pendidikan.

Penetapan anggaran pendidikan, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap sumber-sumber anggaran pendidikan di daerah. Komite juga memberikan pertimbangan mengenai anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah harus melakukan perannya sebagai badan pertimbangan secara terus menerus dan berkesinambungan, karena hal itu akan sangat membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan program kegiatan yang akan dijalankan. Hadirnya komite sekolah juga dapat membantu pihak sekolah mengetahui potensi yang dimiliki sekolah serta potensi pendidikan yang dimiliki masyarakat yang dapat membantu

kelancaran proses pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan khusus di SMP Negeri Kabupaten Bintan.

b. Sebagai bahan pendukung

Komite sekolah sebagai badan pendukung berada dalam kategori baik. Dalam Kemendiknas No 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, peran komite sekolah sebagai badan pendukung adalah: 1) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan; 2) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; 3) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Dari hasil penelitian bahwa peran komite sekolah di SMP Negeri Bintan kurang optimal khususnya dalam pengadaan dana/ fasilitas/ sumber daya yang dibutuhkan, apalagi sejak digulirkan program dana BOS. Pada hal anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah sangat terbatas. Hal ini berdampak pada penerimaan bantuan dana bagi sekolah dirasakan sangat kurang. Untuk itu disinilah peran komite sekolah diperlukan dalam memantau kondisi anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Dari hasil pemantauan tersebut komite sekolah dapat membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan dana dengan cara memobilisasi dukungan dana yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam hal pengadaan dana. Pemberdayaan dukungan anggaran yang dilakukan komite sekolah akan dipantau perkembangan melalui evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran tersebut. Oleh karena itu komite harus meningkatkan perannya

sebagai badan pendukung. Dalam mendorong partisipasi orangtua dan masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan incidental bersama orangtua dan anggota masyarakat dan juga dengan memotivasi orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan timbul perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di SMP Negeri Kabupaten Bintan.

c. Badan Pengontrol

Dengan peranannya sebagai badan pengontrol, komite sekolah berada dalam kategori baik. Komite sekolah selalu melakukan pengawasan dan pengontrolan khususnya terhadap pelaksanaan program sekolah dan anggaran sekolah. Kegiatan pengawasan dan pengontrolan tersebut dimaksudkan agar komite sekolah mengetahui sejauh mana sekolah telah melaksanakan program sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan juga untuk mengetahui apakah sekolah mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu yang paling penting adalah agar tidak terjadi penyimpangan atas penggunaan dana sekolah. Hal ini sesuai dengan Kemendiknas No 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, peran komite sekolah badan pengontrol yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan ke luaran pendidikan. Peran komite sebagai pengontrol yaitu melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk penilaian kualitas kebijakan dan

perencanaan yang ada. Dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah, komite sekolah berperan dalam mengontrol pelaksanaan program yang ada di sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang telah disusun atau tidak. Selain itu juga komite sekolah mengontrol alokasi dana dan sumber daya lain bagi pelaksanaan program sekolah tersebut. Komite sekolah pun berperan dalam melakukan penilaian terhadap hasil pengeluaran pendidikan di sekolah, seperti penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di sekolah. Hasil penilaian terhadap output pendidikan di sekolah dikoordinasikan oleh komite sekolah kepada dewan pendidikan, yang mana hasil penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi dewan pendidikan dalam memetakan persoalan pemerataan dan mutu keluaran pendidikan. Selain itu penilaian ini akan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komite sekolah di SMP Negeri Kabupaten Bintan telah melaksanakan perannya sebagai badan pengontrol dengan baik. Jika hal terus menerus dilakukan, maka kinerja SMP Negeri Kabupaten Bintan akan semakin baik serta adanya tindakan korektif terhadap penyimpangan yang ada.

d. Sebagai badan Penghubung (Mediator)

Keberadaan komite sekolah sangat diperlukan karena bisa menjadi jembatan atau penghubung antara sekolah dengan orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat. Sebagai badan penghubung, komite sekolah telah memperlihatkan

kerja yang baik. Aspek yang dinilai dari kinerja komite sekolah ini bisa diidentifikasi dari upaya yang dilakukan komite sekolah dalam mensosialisasikan program penggalan dana/fasilitas/sumberdaya lainnya kepada masyarakat/orang tua siswa, membantu kepala sekolah menyampaikan hasil pertanggungjawaban keuangan sekolah kepada orang tua atau masyarakat dan pemerintah daerah setempat, menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis mengenai hasil aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, mengadakan pengajakan tentang kemungkinan untuk mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah dan menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah setempat mengenai penambahan anggaran pendidikan bagi sekolah.

Hal itu sesuai dengan Permendiknas no.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) adalah:

- a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat
- b. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*mediator agency*) lebih pada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dinas pendidikan. Hal ini dilakukan oleh komite sekolah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan, yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program pendidikan. Hasil penyempurnaan

kebijakan dan program pendidikan tersebut harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat, yang mana mensosialisasikan ini juga merupakan tugas komite sekolah.

Disamping itu, komite sekolah berperan menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, atau antar sekolah dengan dinas pendidikan. Misalnya saja, komite sekolah dapat berperan dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua yang kurang dapat respon dari sekolah. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat adalah mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan.

Oleh karena itu komite sekolah harus melakukan perannya sebagai badan penghubung secara terus menerus dan berkesinambungan, karena hal itu akan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* SMP Negeri Kabupaten Bintan.